

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran secara komprehensif tingkat capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM tersusun dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi perekonomian. Ketiga dimensi tersebut dianggap mampu menggambarkan pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karena itu perkembangan ketiga dimensi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan IPM suatu daerah.

Perkembangan IPM di Kabupaten Tegal menunjukkan kenaikan yang positif dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu 2019 IPM Kabupaten Tegal tumbuh sebesar 1,35 persen dari tahun 2018, pada tahun ini IPM Kabupaten Tegal hanya tumbuh sebesar 0,22 persen dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Covid-19 yang melanda Kabupaten Tegal pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Tumbuhnya IPM dari tahun 2019 ke 2020 menjadi 68.39 dikarenakan adanya kenaikan dari beberapa dimensi-dimensi penyusunnya. Indeks kesehatan pada tahun 2019 meningkat dari 0,791 menjadi 0,794 di tahun 2020. Indeks pendidikan pada tahun 2019 meningkat dari 0,578 menjadi 0,585 pada tahun 2020.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Tegal pada tahun 2020 terpaut 1,318 juta rupiah di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Jawa Tengah yaitu mencapai 10,930 juta rupiah. Komponen umur harapan hidup Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Jika pada tahun 2019 UHH Kabupaten Tegal hanya meningkat 0,12 tahun, pada tahun 2020 UHH Kabupaten Tegal dapat meningkat sebesar 0,20 tahun yakni, dari 71,40 tahun di tahun 2019 menjadi 71,60 tahun di tahun 2020.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan aspek pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selama kurun waktu tahun



2016 hingga tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Tegal hanya meningkat sebesar 0,44 tahun. Terjadi perlambatan pertumbuhan RLS Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2019 RLS tumbuh sebesar 2,35 persen sedangkan pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 1,75 persen. Pada tahun 2020 rata-rata penduduk Tegal yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata lama sekolahnya adalah 6,98 tahun atau hampir dapat menamatkan kelas 7. Pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tegal masih tertinggal dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang bisa dapat mencapai 7,69 tahun

Tabel 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPM :	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).



Tabel 2. 2 Pertumbuhan IPM eks - Karisedenan

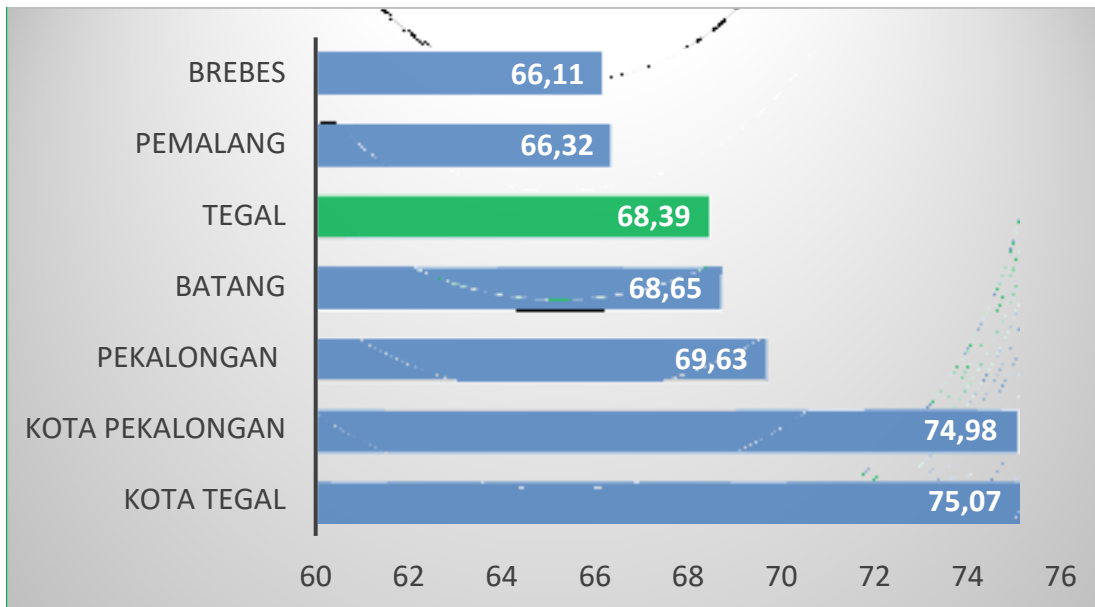
Kab/Kota	IPM	Pertumbuhan (%)	IPM Kriteria
Batang	68,65	0,34	tinggi
Pekalongan	69,71	-0,11	sedang
Pemalang	66,32	0,00	sedang
Tegal	68,39	0,22	sedang
Brebes	66,11	-0,02	sedang
Kota Pekalongan	74,98	0,28	tinggi
Kota Tegal	75,07	0,19	tinggi
Jawa Tengah	71,87	0,20	Tinggi



Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).



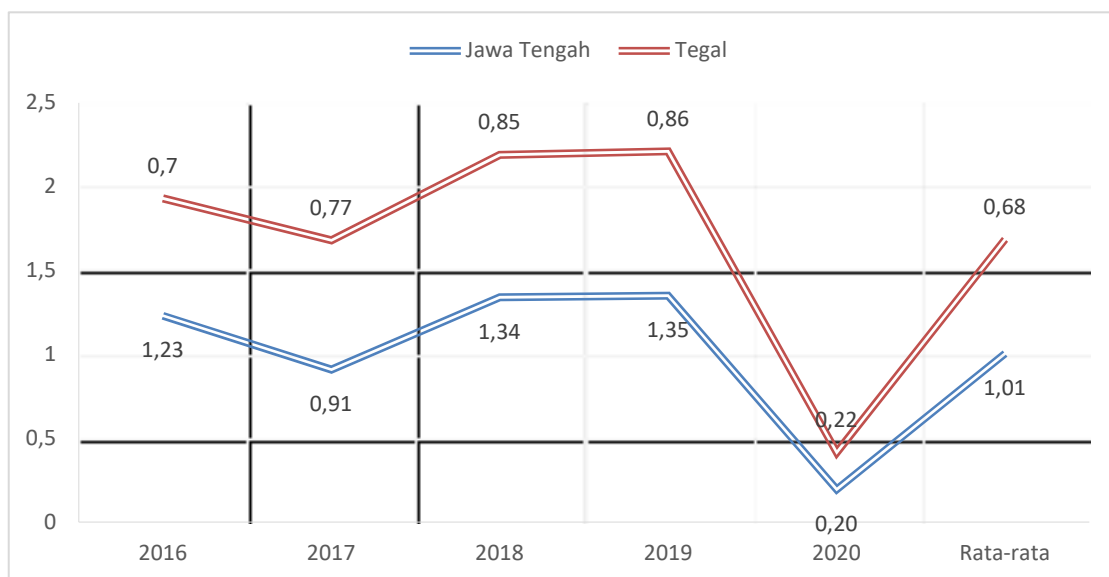
Gambar 2. 1 IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 2. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Selama periode 2014-2020, Penduduk miskin di Kabupaten Tegal menunjukkan tren fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tahun 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 140,30 ribu jiwa atau 9,87 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Tegal. Secara nominal, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 143,54 ribu jiwa pada tahun berikutnya dengan persentase sekitar 10,09 persen dan meningkat menjadi 144,22 ribu jiwa (10,10 persen) di tahun 2016. Selama tahun-tahun selanjutnya jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup konsisten. Namun, tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sejumlah 117,50 ribu jiwa atau 8,14 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal.

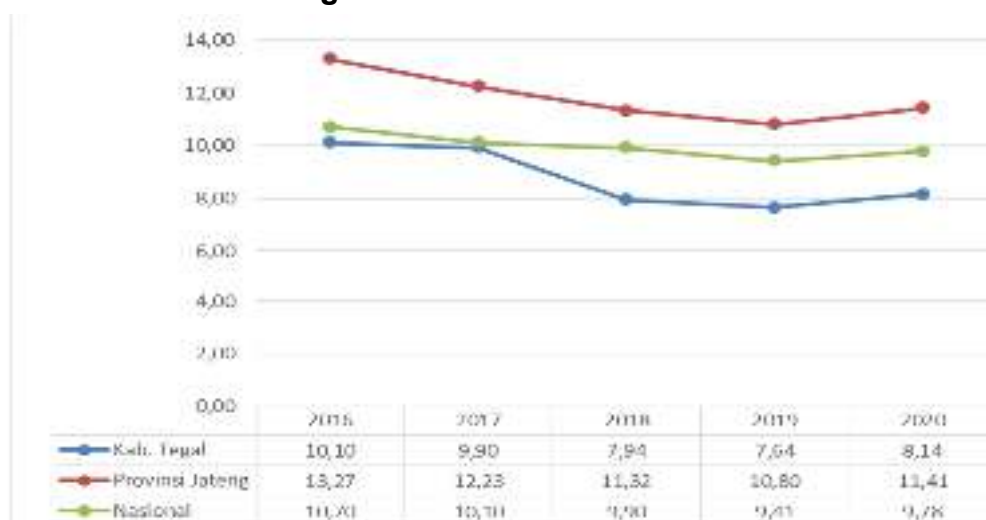
Meningkatnya kemiskinan pada tahun 2020 tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19. Masyarakat miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Menurut Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19, hampir 50 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah (1,8 juta ke bawah) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Penurunan tersebut menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2014 hingga 2020. Pada tahun 2014, garis kemiskinan di Kabupaten Tegal sebesar Rp. 271,875,00 kemudian terus meningkat menjadi Rp. 390.520,00 pada tahun 2020. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.



Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Gambar 2.3. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

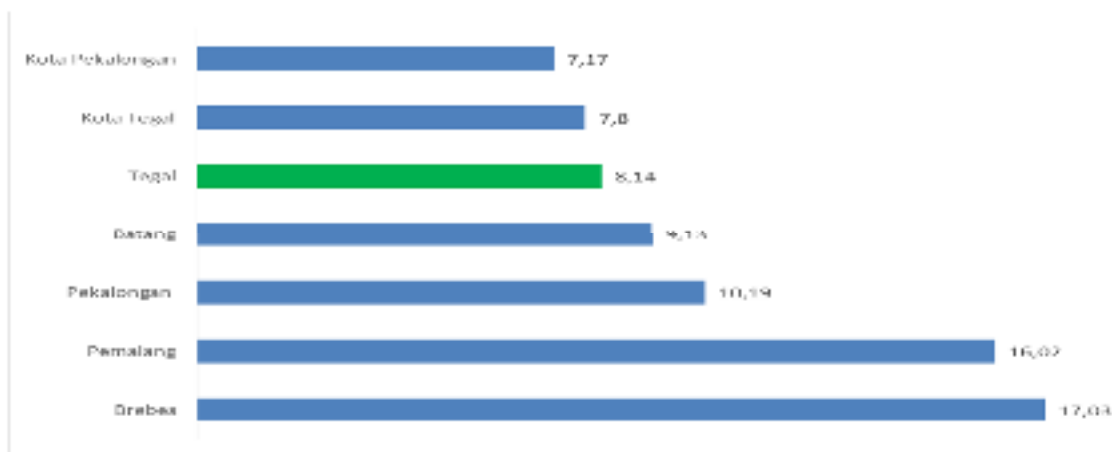
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi



makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.4. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan untuk keluarga miskin. Namun, pandemi Covid 19 merupakan penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Pandemi Covid 19 mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mengakibatkan daya beli (tingkat konsumsi) masyarakat mengalami perlambatan. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Sektor pariwisata juga mengalami keterpurukan, banyak pengusaha kecil dan pekerja yang kehilangan penghasilan.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya



berupa penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19 baik yang terdampak kesehatan maupun ekonomi. Kabupaten Tegal menganggarkan Belanja Bantuan Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial berupa bantuan Beras bagi masyarakat terdampak dan stimulus ekonomi di beberapa sektor yang terdampak. Bantuan diberikan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

c. Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan (www.bps.go.id), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2004). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Pada Agustus tahun 2020 di Kabupaten Tegal jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 644.978 orang terdiri dari 383.368 Laki-laki 261.610 perempuan. Sedang jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 70.246 orang terdiri dari 52.289 laki-laki dan 17.957 orang perempuan. Semuanya adalah total penduduk angkatan Kerja, karena ada sejumlah 360.031 orang yang bukan angkatan kerja, diantaranya anak sekolah, ibu rumah tangga, dan orang lanjut usia.

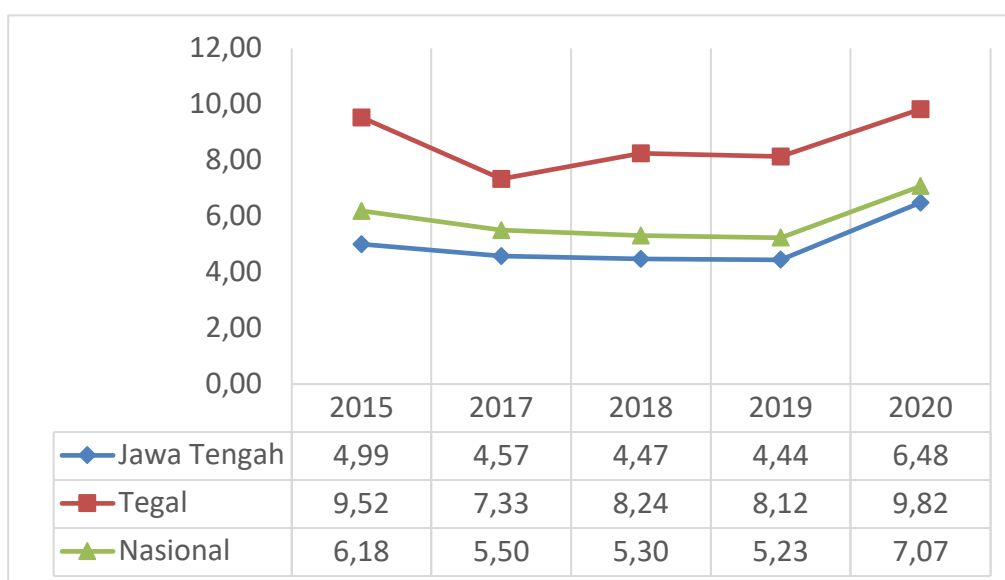
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020



Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 66,52 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2020. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena Covid-19, Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19, Sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak Covid-19 diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

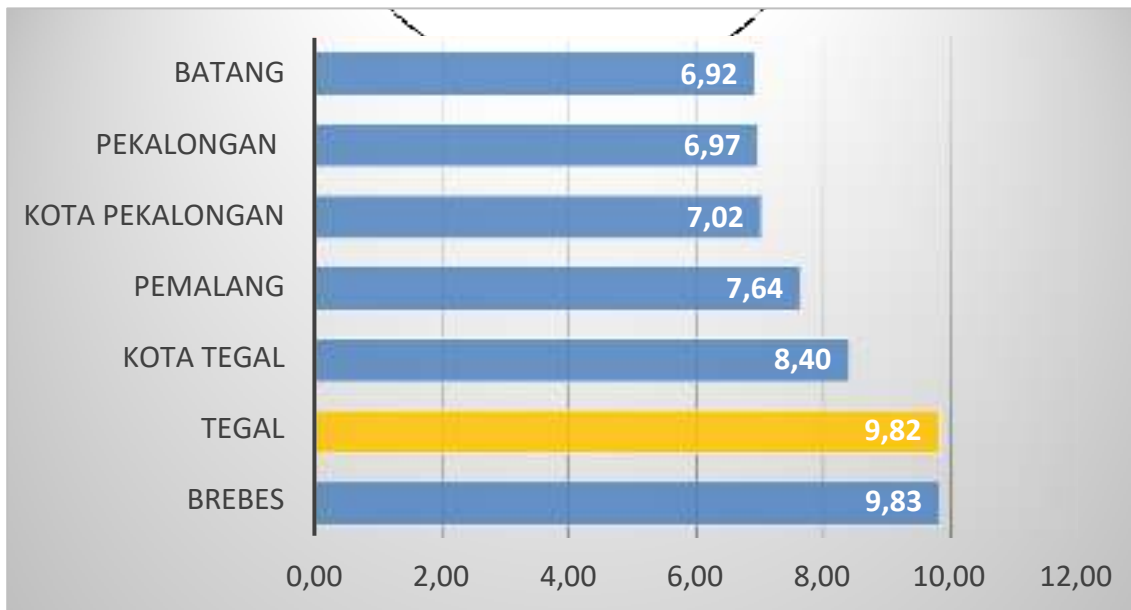
Gambar 2.5. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020



Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2020 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.6. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 9,82% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,92%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



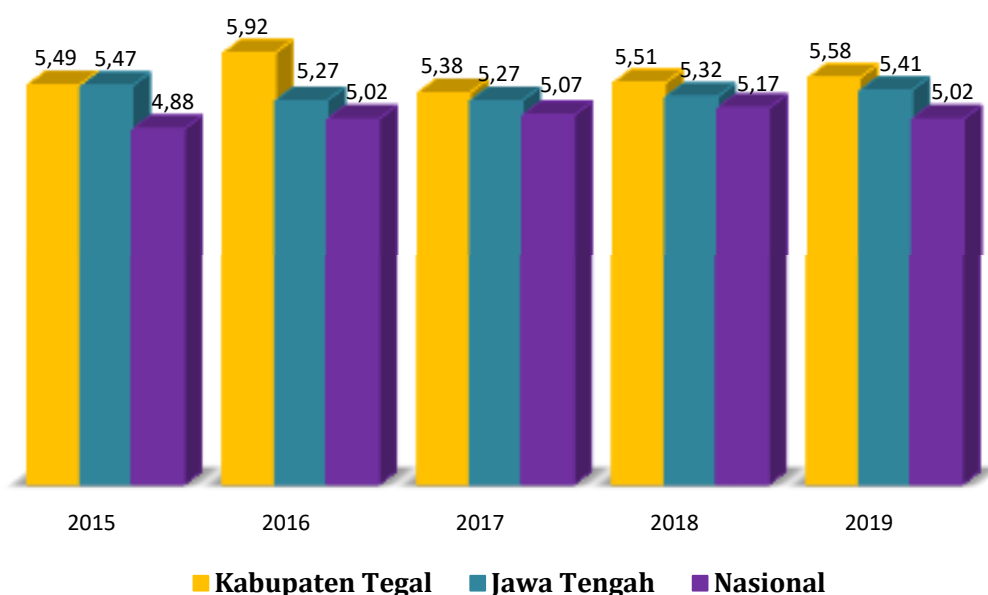
Laju pertumbuhan Ekonomi masa sebelum tahun 2020 selalu menunjukkan angka yang stabil berkisar antara 5.-6 persen , ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, dimana pada tahun 2015-2019 berturut –turut adalah 5.49, 5.92, 5.38, 5.51, dan 5.58. Sedangkan di tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid-19 memporakporandakan system perekonomian Kabupaten Tegal pada khususnya dan Ekonomi Indonesia pada umumnya.

Dengan adanya pembatasan social distancing akan mengurangi bahkan menghentikan aktivitas ekonomi dari Industri, tenaga kerja dirumahkan atau dikurangi, perdagangan sepi, pariwisata, hotel dunia hiburan terhenti, transportasi lesu, dunia pendidikan dan dunia kerja WFH, apalagi fenomena sekarang menjadikan masyarakat takut berobat ke fasilitas kesehatan.

Apapun itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal atas dasar Harga Konstan bertahap dari triwulan 1-3 sebagai berikut 2.69 di triwulan 1, -5.86 di triwulan 2, dan -3.85 di triwulan 3.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2016 sampai pada angka 5,92%.

Gambar 2. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



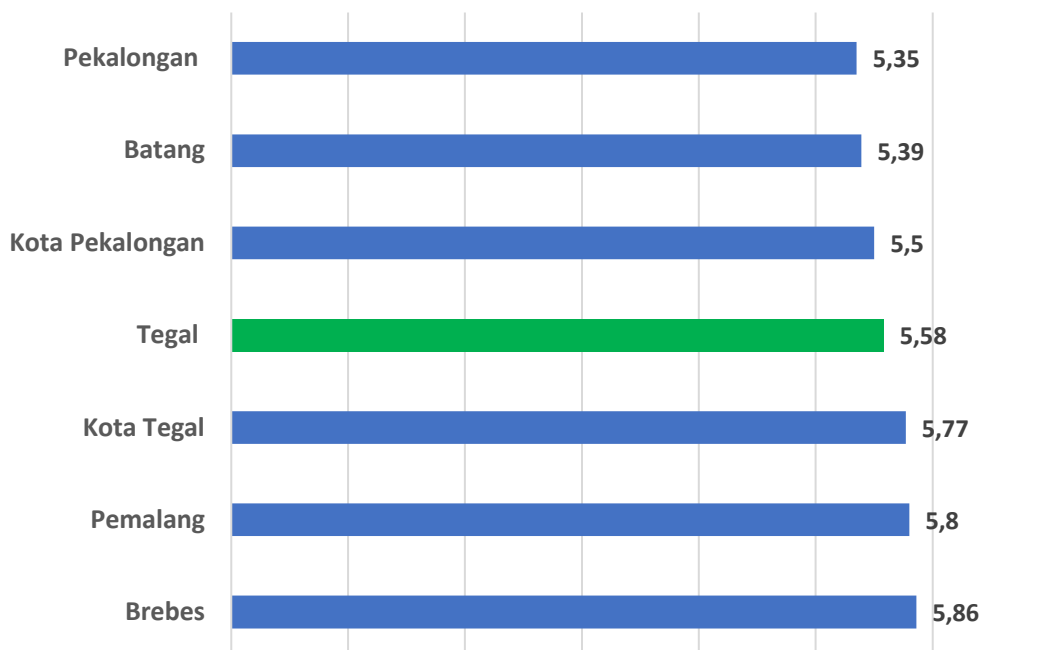
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020



Berdasarkan data Tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,58% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (5,35%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (5,86%).

Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 6,14%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 6,74%, kategori Real Estate 4,07%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,66%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,24%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,78%, kategori Petambakan dan Penggalian sebesar 5,19%, kategori Konstruksi sebesar 5,85% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,43%, kategori Jasa Lainnya 7,70%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 1,44%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar



3,46%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,30%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,78%.

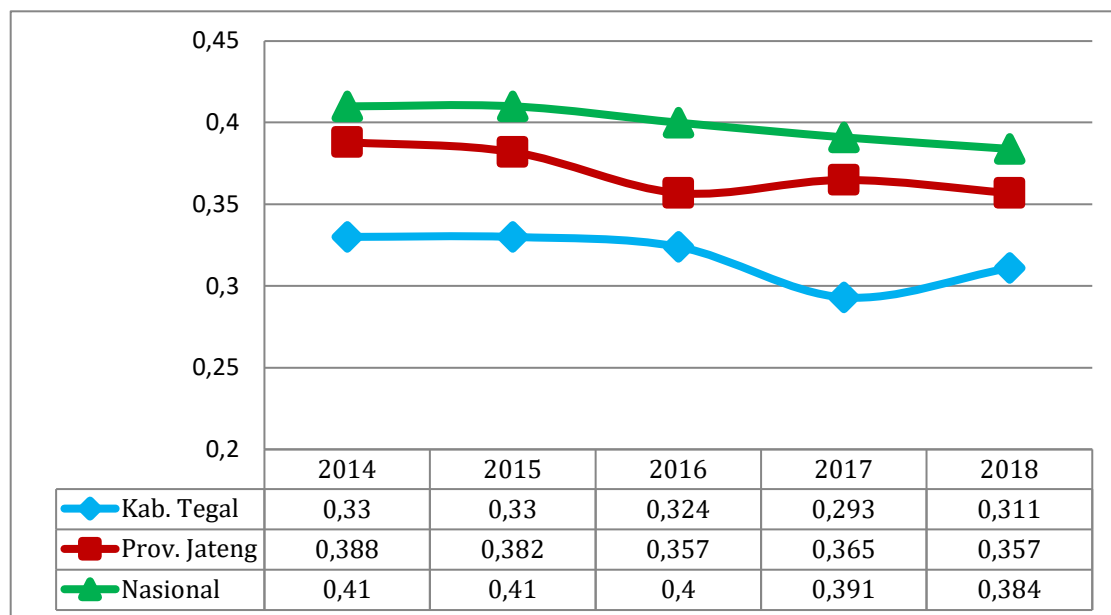
e. Pendapatan Perkapita

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum maka kita menghitung Pendapatan Perkapita yang dihitung dari Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun. Pada Tahun 2020 angka pendapatan perkapita kita adalah 24.460.000 rupiah per tahun per orang , artinya setiap orang di Kabupaten Tegal berpendapatan Rp,2.038.333,- per bulan.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indek gini.

Gambar 2.9. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah; bila G antara $0,35 - 0,5$



ketimpangan taraf sedang; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah 0,35 sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah mauapun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

Tabel. 2.4. Indikator Kinerja Mikro

NO	Indikator Kinerja Mikro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.24	68.39	0.22
2	Angka Kemiskinan	109.938	117.497	8.14
3	Angka Pengangguran	8.12	9.82	1.7
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.58	-1.46	7.04
5	Pendapatan Perkapita	24.460.000	24.610.000	150.000
6	Ketimpangan pendapatan (gini Ratio)	0,322	0,323	0.001

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDIDIKAN		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	464		Unit



	2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	orang
	3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		Yang ada biaya siswa (tdk bebas seluruhnya)
	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2.990		orang
	5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	3.012		orang
	6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.351		orang
	7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	522		orang



		sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	787	DIKBUD	
	2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	159.481	DIKBUD	APBN
	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	79.764	DIKBUD	APBN
	4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	159.481	DIKBUD	
	5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan	79.764	DIKBUD	



		biaya pendidikan			
	6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.080	DIKBUD	
	7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.601	DIKBUD	
	8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.885	DIKBUD	
	9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.650	DIKBUD	
	10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.092	DIKBUD	
	11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.515	DIKBUD	
	12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	989	DIKBUD	
	13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	295	DIKBUD	



		dan Swasta)			
	14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.527	DIKBUD	
	15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.889	DIKBUD	
	16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	846	DIKBUD	
	17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	190	DIKBUD	



	18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	522	DIKBUD	
	19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	369	DIKBUD	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama					
	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	787	DIKBUD	
	2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	159.481	DIKBUD	
	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	79.764	DIKBUD	
	4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima	159.481	DIKBUD	



		pembebasan biaya pendidikan			
	5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	79.764	DIKBUD	
	6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.080	DIKBUD	
	7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.601	DIKBUD	
	8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.885	DIKBUD	
	9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.650	DIKBUD	
	10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.092	DIKBUD	
	11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.515	DIKBUD	
	12.	Jumlah tenaga kependidikan	989	DIKBUD	



		pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			
	13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	295	DIKBUD	
	14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.527	DIKBUD	
	15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.889	DIKBUD	
	16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	846	DIKBUD	
	17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki	190	DIKBUD	



		ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
	18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	522	DIKBUD	
	19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	369	DIKBUD	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
	1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	24	DIKBUD	
	2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DIKBUD	
	3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang	6.289	DIKBUD	



		menerima pembebasan biaya pendidikan			
	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	213	DIKBUD	
	5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	263	DIKBUD	
	6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	133	DIKBUD	
	7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		DIKBUD	Sesuai juknis Tidak perlu diisi
	8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10	DIKBUD	
KESEHATAN	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
	1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang	9	DINAS KESEHATAN	



		memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi				
	2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	9	DINAS KESEHATAN	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
	3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.360 org	DINAS KESEHATAN	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
	5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	6.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.360 org	DINAS KESEHATAN	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
	7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.361 org	DINAS KESEHATAN	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	10.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.404 org	DINAS KESEHATAN	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				



	11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.309 org	DINAS KESEHATAN	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
	13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	14.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.447 org	DINAS KESEHATAN	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
	15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.447 org	DINAS KESEHATAN	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
	17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.401 org	DINAS KESEHATAN	
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
	19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.447 org	DINAS KESEHATAN	



	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
	21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	22.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	58 org	DINAS KESEHATAN	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
	23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	24.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	573 org	DINAS KESEHATAN	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
	25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 paket	DINAS KESEHATAN	
	26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.405 org	DINAS KESEHATAN	
PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten				
	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	21.182.2 5 Ha	Dinas Perkimtaru	
	2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0	Dinas Perkimtaru	Kewenangan provinsi
	3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan	1.400 Ha	Dinas Perkimtaru	



		abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)			
	4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0	Dinas Perkimtaru	Kewenangan Provinsi
	5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	
	6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	
	7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0	Dinas Perkimtaru	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten					
	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	21.182.25 Ha	Dinas Perkimtaru	
	2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0	Dinas Perkimtaru	
	3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	1.400 Ha	Dinas Perkimtaru	



		yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)			
	4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0	Dinas Perkimtaru	
	5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	
	6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	
	7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0	Dinas Perkimtaru	
Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi					
	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		DPU	
	2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	162.47	DPU	
			276.02	DPU	
	3.	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik		DPU	



	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
	1.	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten	Ada	Dinas Perkimtaru	
	2.	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten	Tidak	Dinas Perkimtaru	
	3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten penyelenggaran SPAM	1	Dinas Perkimtaru	
	4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	16	Dinas Perkimtaru	
	5.	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	Dinas Perkimtaru	
	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	224.539 Rumah	Dinas Perkimtaru	
	2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk	897 Rumah	Dinas Perkimtaru	



		kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			
	3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	245.436 Rumah	Dinas Perkimtaru	
	4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	777 Rumah	Dinas Perkimtaru	
	5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	777 Rumah	Dinas Perkimtaru	
	6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	244.659 Rumah	Dinas Perkimtaru	
	7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	17.586 60.343	Dinas Perkimtaru	29,14%
	8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPADL S akses aman	777 202,676	Dinas Perkimtaru	0,38%
	9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	897 202,676	Dinas Perkimtaru	0,44%



	10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	244.539	Dinas Perkimtaru	92,97
			263.021		
	11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	80	Dinas LH	08%
			100		
	12.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	75	Dinas LH	0,75%
			100		
	13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		Dinas Perkimtaru	
	14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	21	Dinas LH	
			777	Dinas Perkimtaru	
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
	1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	42	Dinas Perkimtaru	10,42%
			403		
	2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	1400	Dinas Perkimtaru	
	3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Perkimtaru	
	4.	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak	Dinas Perkimtaru	
	5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	33	Dinas Perkimtaru	



	6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0	Dinas Perkimtaru	
	7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	2.677	Dinas Perkimtaru	
	8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	2.677	Dinas Perkimtaru	
Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota					
	1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	847.27	DPU	
	2.	Panjang jalan yang dibangun	0	DPU	
	3.	Panjang jembatan yg dibangun	0	DPU	
	4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	27.129 KM	DPU	
	5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	87 M	DPU	
	6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	DPU	
	7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	167.7 M	DPU	
	8.	Panjang jalan yang dipelihara	76.07 KM	DPU	
	9.	Panjang jembatan yang dipelihara	446.8 M	DPU	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/a	0	DPU	



		nalis di wilayah kabupaten			
	2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten	2	DPU	
	3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	711	DPU	
	4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Tidak		
	5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kabupaten	Tidak Ada	DPU	
	6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada		
	7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada		



	8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada		
	9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada	DPU	
	10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada		
	11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	711	DPU	Ada



	12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kabupaten	711	DPU	Ada
	13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	125	DPU	Ada
	14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	125	DPU	Ada
	15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada		
	16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPU	
	17.	Tersedianya data dan informasi hasil	Tidak ada	DPU	



		pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
	18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	173	DPU	
	19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	0		
	20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	219	DPU	
	21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	126	DPU	
	22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	119	DPU	
	23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan	0	DPU	



		usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
	24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
	25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten					
	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	72.766 unit	Dinas Perkimtaru	
	2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	92		
	3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	292	Dinas Perkimtaru	
	4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	92	Dinas Perkimtaru	
	5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	0	Dinas Perkimtaru	



		sesuai dengan rencana aksi			
	6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perkimtaru	
	7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perkimtaru	
	8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	292	Dinas Perkimtaru	
	9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dinas Perkimtaru	
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					
	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		
	2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		
	3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang	Tidak Ada		



		sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
	4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		
	5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		
	6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada		
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani					
	1.	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	57,91 Ha	Dinas Perkimtaru	
	2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0 Unit	Dinas Perkimtaru	
	3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	10,19		
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
	1.	Jumlah rumah di kabupaten	387.253 rumah	Dinas Perkimtaru	
	2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	5.575 rumah	Dinas Perkimtaru	
	3.	Jumlah rumah tidak layak huni	37.100 rumah	Dinas Perkimtaru	



	4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak	Dinas Perkimtaru	
	5.	Rasio rumah dan KK	538.004	Dinas Perkimtaru	
			387.253		
	6.	Jumlah rumah pembangunan baru	3.040		
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
	1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	126 perum	Dinas Perkimtaru	
	2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	213.228 rumah	Dinas Perkimtaru	
	3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	166.123	Dinas Perkimtaru	
	4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	387.253 rumah	Dinas Perkimtaru	
	5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	126 perum	Dinas Perkimtaru	
	6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	11.770	Dinas Perkimtaru	
	7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	27 pengem	Dinas Perkimtaru	
	8.	Jumlah pengembang yang terregistrasi	27 pengem	Dinas Perkimtaru	
	9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	27 pengem	Dinas Perkimtaru	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	6 pelanggaran	Dinas Perkimtaru	



	2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	576 org	Dinas Perkimtaru	
	3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9 Perda	Dinas Perkimtaru	
	4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 org	Dinas Perkimtaru	
	5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Dinas Perkimtaru	
	6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Dinas Perkimtaru	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
	1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Recofusing
			0		
	2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	379.828	BPBD	65%
			584.336		
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	0%
			0		
	2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai	1	BPBD	100%
			1		



		dinyatakan sah/legal			
	3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1.170 584.336	BPBD	0,2%
	4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	8.070 584.336	BPBD	1,38%
	5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	379.828 584.336	BPBD	65%
	6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	2.085 584.336	BPBD	0,89%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1 1	BPBD	100%
	2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	52 52	BPBD	100%
	3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	224 444	BPBD	50%
	4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	52.002 233.597	BPBD	22,26%
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban					



kebakaran					
	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	56 Darurat 63 non darurat	Satpol PP	
	2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 Pos	Satpol PP	
	3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Satpol PP	
	4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	Satpol PP	
	5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	9	Satpol PP	
	6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	43 Aparatur	Satpol PP	



		Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
	7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satpol PP	Dibawah binaan tidak ada
	8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Satpol PP	Recofusing
SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dsarnya diluar panti				
	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	126	Dinas Sosial	
	2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	394	Dinas Sosial	
	3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	206	Dinas Sosial	
	4.	Jumlah penyandang disabilitas	702	Dinas Sosial	



		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			
	5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
	6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	340	Dinas Sosial	
	7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
	8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	220	Dinas Sosial	
	9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	40	Dinas Sosial	
	10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4	Dinas Sosial	
	11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang	1	Dinas Sosial	



		tersedia			
	12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	Dinas Sosial	
	13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	Dinas Sosial	
	14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	206	Dinas Sosial	
	15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	260	Dinas Sosial	
	16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	214	Dinas Sosial	
	17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	20	Dinas Sosial	



		difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
	18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial	
	19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	50	Dinas Sosial	
	20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	40	Dinas Sosial	
	21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	40	Dinas Sosial	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten					
	1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	400 org	Dinas Sosial	
	2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket	103 org	Dinas Sosial	



		sandang			
	3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2 tenda	Dinas Sosial	
	4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	62 paket	Dinas Sosial	
	5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	203 org	Dinas Sosial	
	6.	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	221 org	Dinas Sosial	
KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada	Dinas Perinaker	
	2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	5 9	Dinas Perinaker	55,56%
	3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	2.558 perusahaan	Dinas Perinaker	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
	1.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	16 36	Dinas Perinaker	44,4%
	2.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	14 14	Dinas Perinaker	100%
	3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta	14 576	Dinas Perinaker	2,43%



		pelatihan			
	4.	Persentase LPK yang terakreditasi	2 42	Dinas Perinaker	4,76%
	5.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	4 42	Dinas Perinaker	9,52%
	6.	Jumah penganggur yang dilatih	576 orang	Dinas Perinaker	
	7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	576 576	Dinas Perinaker	100%
	8.	Persentase penyerapan lulusan	143 576	Dinas Perinaker	
	9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	576 576	Dinas Perinaker	
	10.	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Perinaker	Recofusing
	11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Perinaker	Recofusing
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	4 2.558	Dinas Perinaker	0,16%
	2.	Data tingkat produktivitas total	-305,12	Dinas Perinaker	
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan					
	1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	382 474	Dinas Perinaker	80,59%



	2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	5 16	Dinas Perinaker	31,25%
	3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	16	Dinas Perinaker	16%
	4.	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	29 382	Dinas Perinaker	7,59%
	5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	2.558 2.558	Dinas Perinaker	100%
	6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	27 2.558	Dinas Perinaker	1,06%
	7.	Jumlah mogok kerja	1 mogok	Dinas Perinaker	
	8.	Jumlah penutupan perusahaan	4 perusa	Dinas Perinaker	
	9.	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada	Dinas Perinaker	
	10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada	Dinas Perinaker	
	11.	Jumlah perselisihan PHK	27 perseli sihan	Dinas Perinaker	
	12.	Jumlah pekerja/buruh ter-	328 org	Dinas Perinaker	



		PHK			
	13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	2 perselisihan	Dinas Perinaker	
	14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	Belum terbentuk	Dinas Perinaker	
	15.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	25	Dinas Perinaker	92,59%
			27		
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten					
	1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	2.713 LW	Dinas Perinaker	
	2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	15.189 org	Dinas Perinaker	
	3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	46 BKK	Dinas Perinaker	
	4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	7 org	Dinas Perinaker	
	5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 org	Dinas Perinaker	
	6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu	Tidak ada	Dinas Perinaker	



		wilayah kabupaten			
	7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	167 perjanjian	Dinas Perinaker	
	8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2.706 org	Dinas Perinaker	
	9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tdk ada	Dinas Perinaker	
	10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	193 org	Dinas Perinaker	
	11.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangan	Tdk ada	Dinas Perinaker	
	12.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	Tdk ada	Dinas Perinaker	
	13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada	Dinas Perinaker	



	14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Tdk Ada	Dinas Perinaker	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
	1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	44 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	
	2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	37 prog/keg	Dinas P3AP2 dan KB	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten				
	1.	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4 media masa	Dinas P3AP2 dan KB	
	2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	22 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	
	3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	36 36	Dinas P3AP2 dan KB	100%
	4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat	22 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	



		pelatihan			
	5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten (APBD kabupaten)	12 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
	1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	3 orgs	Dinas P3AP2 dan KB	
	2.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	18 org	Dinas P3AP2 dan KB	
	3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	
	4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	1 lembaga	Dinas P3AP2 dan KB	
	5.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang	1 kebijakan	Dinas P3AP2 dan KB	



		sudah dievaluasi			
	6.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0	Dinas P3AP2 dan KB	
	7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	40	Dinas P3AP2 dan KB	100%
			40		
Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan				
	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Dinas Tankp	
	2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas Tankp	
	3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tdk ada	Dinas Tankp	
	4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	Dinas Tankp	
	5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tidak ada	Dinas Tankp	
	6.	Tertanganinya kerawanan pangan	ada	Dinas Tankp	
	7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan	ada	Dinas Tankp	



		rawan pangan			
	8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	Dinas Tankp	
Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
	1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	27.217 27.217	Dinas PTSP dan PM	
	2.	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perkimtaru	
	3.	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Dinas Perkimtaru	
	4.	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perkimtaru	
	5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	0	Dinas Perkimtaru	
LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten				
	1.	Hasil Perhitungan kota terhadap :	55,05%	Dinas Lingkungan Hidup	
		a) Indeks Kualitas Air,(IKA)	9,33%	Dinas Lingkungan Hidup	
		b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	25,50%	Dinas Lingkungan Hidup	
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	20,22%	Dinas Lingkungan Hidup	



	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten				
	1.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	Ada	Dinas Lingkungan Hidup	
LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten				
	1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	78,79%	Dinas Lingkungan Hidup	78,79%
	2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota	6 78	Dinas Lingkungan Hidup	8%
	3.	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Pemerintah Kabupaten	0	Dinas Lingkungan Hidup	
	4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup	
	5.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	12 lembaga 50	Dinas Lingkungan Hidup	100%
	6.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin	9 10	Dinas Lingkungan Hidup	90%



		PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota yang ditangani			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik				
	1.	Penerbitan akta perkawinan	339 339	Disdukcapil	100%
	2.	Penerbitan akta perceraian	84 84		
	3.	Penerbitan akta kematian	10.546 15.474	Disdukcapil	100%
	4.	Penyajian data kependudukan	2 2		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal				
	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	194	Dispermasdes	
	2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	194		
	3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	32	Dispermasdes	
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan	17	Dispermasdes		



		kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
Persentase peningkatan status desa mandiri					
	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	2	Dispermasdes	
	2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	2	Dispermasdes	
	3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak ada	Dispermasdes	
	4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	126	Dispermasdes	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)				
	1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Dinas PA3P2 KB	
	2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	9,98	Dinas PA3P2 KB	
	3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age	16	Dinas PA3P2 KB	



		Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			
	4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0	Dinas PA3P2 KB	
	5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	36 stakeholder	Dinas PA3P2 KB	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
	1.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	56 64	Dinas PA3P2 KB	87,5%
	2.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	186.867 275.891 50.879 186.867	Dinas PA3P2 KB	68% 27,23%
	3.	Pemerintah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	19	Dinas PA3P2 KB	
	4.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	2.675 26.935	Dinas PA3P2 KB	9,93
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
	1.	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	18 287	Dinas PA3P2 KB	6,27%



	2.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	39.751 59.608	Dinas PA3P2 KB	66,69%
PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas kabupaten				
	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	3 3	Dinas Perhubungan	100%
	2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	8.198 11.090	Dinas Perhubungan	
	3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	21 21	Dinas Perhubungan	
	4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	1.142 1.850	Dinas Perhubungan	57%
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kot					
	1.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	1,142 1.850	Dinas Perhubungan	57%
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	8 48	Diskominfo	16,67%



		yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
	2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	8 48	Diskominfo	16,67%
	3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Diskominfo	
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
	1.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	107 110	Diskominfo	97,27%
	2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki	27 48	Diskominfo	56,25%



		portal dan situs web yang sesuai standar			
	3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	48 48	Diskominfo	100%
	4.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	151 308	organisasi	
	5.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	3 110	Diskominfo	2,71%
	6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	90 110	Diskominfo	81,81%
	7.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung	13 110	Diskominfo	11,82%



		layanan pemerintah			
	8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	27 48	Diskominfo	56,25%
	9.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	27 48	Diskominfo	56,25%
	10.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	48 48	Diskominfo	100%
	11.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	6 12	Diskominfo	18,75%
	12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	46 48	Diskominfo	95,83%
	13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	17 17	Diskominfo	100%
	14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Diskominfo	Perbub No. 76 Tahun 2017 ttg Master Plan TIK
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten				
	1.	Persentase	73	Diskominfo	87,95%



		komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	83		
	2.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	469 567	Diskominfo	82,77%
	3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	1.409 1.434	Diskominfo	98,25%
KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
	1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	72 140	Dinas Dakop dan UKM	18,86%
	2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi	0 0	Dinas Dakop dan UKM	0



		untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten			
	3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	118 438	Dinas Dakop dan UKM	26,94%
	4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	101 212	Dinas Dakop dan UKM	44,81%
	5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	106 438	Dinas Dakop dan UKM	24,20%
	6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	1.137 110.711	Dinas Dakop dan UKM	0,2 %
	7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	3 438	Dinas Dakop dan UKM	0%



		keanggotaan dalam daerah kabupaten			
	8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Dinas Dakop dan UKM	Tidak perlu diisi
	9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	138	Dinas Dakop dan UKM	31,50%
			438		
	10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	212	Dinas Dakop dan UKM	48,40%
			438		
	11.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	53	Dinas Dakop dan UKM	11,41%
438					
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	118	Dinas Dakop dan UKM	26,94%	
		438			



		kabupaten			
	13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	53 438	Dinas Dakop dan UKM	11,41%
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
	1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	352 10.025	Dinas Dakop dan UKM	3,51%
	2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3.976 129.475	Dinas Dakop dan UKM	39,66%
	3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	40.022 129.475	Dinas Dakop dan UKM	31,05%
	4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	417 129.475	Dinas Dakop dan UKM	0,63%
	5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	11.611 129.475	Dinas Dakop dan UKM	0,05%
	6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.267 129.475	Dinas Dakop dan UKM	1,0%
	7.	Persentase usaha mikro yang diberikan	41.753 129.475	Dinas Dakop dan UKM	32,04%



		pendampingan melalui lembaga pendampingan			
PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten				
	1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Ada	Dinas PTSP dan PM	
	2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada		
	3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
	4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
	5.	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas PTSP dan PM	
	6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	Dinas PTSP dan PM	
	7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.036	Dinas PTSP dan PM	
	8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	27.217	Dinas PTSP dan PM	
	9.	Laporan realisasi penanaman modal	9.365.31 5.038.41	Dinas PTSP dan PM	



			5		
	10.	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten	29	Dinas PTSP dan PM	
	11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	47 perusahaan	Dinas PTSP dan PM	
	12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	6 data	Dinas PTSP dan PM	
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	419 orang	Dinas Porapar	
	2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	56 orang	Dinas Porapar	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan				
	1.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1,065 orang	Dinas Porapar	
	2.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40 Orang	Dinas Porapar	
Peningkatan prestasi olahraga					
	1.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	31 Orang	Dinas Porapar	



	2.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Tidak Ada	Dinas Porapar	Suket
STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
	1.	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Diskominfo	
	2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	112	Diskominfo	
	3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	671	Diskominfo	
	4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	112	Diskominfo	
	5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	671	Diskominfo	
	6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0	Diskominfo	Baru ada tahun depan
	7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Diskominfo	Baru ada tahun depan
PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibandin banyaknya jumlah kegiatan strategis yg harus diamankan	35	Diskominfo	
			60		
	2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan	8	Diskominfo	16,33%
			49		



		prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yg ada pada Pemerintah Daerah			
	3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	2 49	Diskominfo	4,08%
	4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Diskominfo	
KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya				
	1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	353 obyek	Dikbud	
	2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	21 obyek	Dikbud	
	3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun	15 obyek	Dikbud	



		karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
	4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	14 org	Dikbud	
	5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	33 cagar budaya	Dikbud	
	6.	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	17 cagar budaya	Dikbud	
	7.	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Tdk ada	Dikbud	Suket
	8.	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	1 cagar budaya	Dikbud	
	9.	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,	17 cagar budaya	Dikbud	



		kebudayaan, dan pariwisata)			
	10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak ada	Dikbud	
	11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	1.266 org	Dikbud	
	12.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6 Tim	Dikbud	
	13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1 Tim	Dikbud	
	14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	1 Tim	Dikbud	
	15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 org	Dikbud	
	16.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	12 org	Dikbud	
	17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2 org	Dikbud	
	18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	10 unit	Dikbud	
	19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5 Kegiatan	Dikbud	
PERPUSTAKA AN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				



	1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	88.864 1,139.54 2	Dinas Arpus	5,63%
	2.	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	20.898 orang 1,139.54 2	Dinas Arpus	
	3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	92 orang 1,139.54 2	Dinas Arpus	
	4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0 669 perpus	Dinas Arpus	
	5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6 Kegiatan	Dinas Arpus	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
	1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naskah	Dinas Arpus	
	2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak ada	Dinas Arpus	suket
	3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Tidak ada	Dinas Arpus	suket
KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 UU No 43/2009 tentang Kearsipan				
	1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	222.669 berkas 222.669	Dinas Arpus	100%



			berkas		
	2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	2.000 2.000	Dinas Arpus	100%
	3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0 0	Dinas Arpus	0
	4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0 0	Dinas Arpus	0
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan barbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesra					
	1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	
	2.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	6 PD	Dinas Arpus	
	3.	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan sesuai NSPK di kabupaten	1 PD	Dinas Arpus	
	4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan ksbupsten yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	Suket
	5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah	0	Dinas Arpus	Suket



		kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
	6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Arpus	Suket
PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)				
	1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	242 rumah tangga	DKPP	
	2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	2 2	DKPP	100%
	3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan	Tidak Ada	DKPP	Suket
	4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	11 Kegiatan	DKPP	



	5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	251.494. 622 Benih	DKPP	
PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	95	Dinas Porapar	
	2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	151	Dinas Porapar	
	3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	21 TDUP	Dinas Porapar	
	4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	137	Dinas Porapar	
	5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Porapar	Recofusing
	6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	Tidak Ada	Dinas Porapar	Recofusing
	7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Porapar	Suket
	8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	7 426	Dinas Porapar	
	9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	80 200	Dinas Porapar	40%



	10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	13 Lokasi	Dinas Porapar	
PERTANIAN		Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
	1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	47 Unit	Dinas TanKP	
	2.	Prasaran pertanian yang digunakan	24 Unit	Dinas TanKP	
	3.	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas TanKP	Suket
	4.	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	24	Dinas TanKP	
			24		
	5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	23	Dinas TanKP	100%
			23		
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
		Persentase fasilitasi penanggulangan Bencana	316	DKPP	
			424		
KEHUTANAN					
	1.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Suket
	2.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Suket
	3.	Pemulihan ekosistem pada TAHURA	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Suket
	4.	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Suket
ESDM		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki			



	ijin di kab/Kabupaten					
	1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Tidak Ada	Dinas Perinaker	Suket	
ESDM	1.	Penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Tidak ada			
PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0	Dinas Dakop dan UKM	100%	
			0			59%
			0			%
	2.	Persentase penerbitan TDG	11 11	Dinas Dakop dan UKM	100%	
	3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	11 123	Dinas Dakop dan UKM	8,94	
	4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Dinas Dakop dan UKM		



	5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	0	Dinas Dakop dan UKM	
	6.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Dakop dan UKM	
	7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	32	Dinas Dakop dan UKM	
			32		
	8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,46%	Dinas Dakop dan UKM	
	Persentase kinerja realisasi pupuk				
	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	58,92	Dinas TanKp	88,137%
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
	1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	2.108	Dakop dan UKM	27,95%
			7.541		
	2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	700	Dakop dan UKM	9,61%
			7.278		
PERINDUSTRI AN	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten				
	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket



		perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten			
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)				
	1.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	75%	Dinas Perinaker	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	1.	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Tidak ada	Dinas Perinaker	40%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	1.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
	1.	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total	66 29.813	Dinas Perinaker	



		populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota			
TRANSMIGRAS I					
	1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket
	2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket
	3.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDIDIKAN	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	40,918	Dikbud	80%
			51,231		
	2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	155,670	Dikbud	107.64
			144,619		
	3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15	63,675	Dikbud	105,99%
			60.074		



		tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
	4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,436 2.505	Dikbud	97%
KESEHATAN	5.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.527 1,579,432	Dinas Kesehatan	0,097%
	6.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	3 9	Dinas Kesehatan	33,33%
	7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	27,107 28,727	Dinas Kesehatan	94,36%
	8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	26,706 28.895	Dinas Kesehatan	99,30%
	9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	26,916 26,916	Dinas Kesehatan	100%
	10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	77,333 105,622	Dinas Kesehatan	73,22%
	11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	59,060 151,884	Dinas Kesehatan	38,88%



		pelayanan kesehatan sesuai standar			
	12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	53,915 1.057.639	Dinas Kesehatan	5,09%
	13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50,378 178.879	Dinas Kesehatan	28,16%
	14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,826 196,785	Dinas Kesehatan	10,07%
	15.	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,605 14,229	Dinas Kesehatan	75%
	16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2,259 3,944	Dinas Kesehatan	57,28%
	17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	8,528 16,932	Dinas Kesehatan	50,37%
	18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	29,276 29,376	Dinas Kesehatan	99,66%



PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	16,570.87	Dinas Perkimtaru	78,23%
			21,182.25		
	20.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	21	Dinas Perkimtaru	
			1		
	21.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	6.946	Dinas Perkimtaru	75%
			9,281		
	22.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	328.658	Dinas Perkimtaru	61,09%
			538.004		
	23.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	263.021	Dinas Perkimtaru	100%
			263.021		



	24.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	26.256	Dinas	100%
			26.258	Perkimtaru	
	25.	Rasio kemantapan jalan	687.25	Dinas	81,11%
			847.27	Perkimtaru	
	26.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki setifikat kompetensi	115	DPU	16,17%
711					
	27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	DPU	Tidak ada
			0		
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	11	Dinas Perkimtaru	100%
			11		
	29.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	Suker
	30.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	10.15	Dinas Perkimtaru	26%
			38,52		
	31.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,100	Dinas Perkimtaru	9,58%
387,253					
	32.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	387,253	Dinas Perkimtaru	98,67%
			387,253		



KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	6	Satpol PP	100%
			6		
	34.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	Satpol PP	89%
			9		
	35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	379.828	BPBD	379.828
	36.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	584.336	BPBD	
	37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	52.002	BPBD	52.002
	38.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	46	Satpol PP	82,14%
			56		
39.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11 menit 9 detik		668 menit dari 56 kejadian	
SOSIAL	40.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	975	Dinsos	100%
			975		



		panti			
	41.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	506 506	Dinsos	100%
TENAGA KERJA	42.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	6 6	Dinas Perinaker	100%
	43.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21 43.255	Dinas Perinaker	0,048%
	44.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	24.866.728 43.255	Dinas Perinaker	574,89%
	45.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	328 2.558	Dinas Perinaker	15%
	46.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	2.706 15.189	Dinas Perinaker	18%
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	47.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	491.411.167. 000 1.029.971.845	P3AP2 dan KB



PERLINDUNGAN ANAK			.000		
48.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	36	391.037	P3AP2 dan KB	0,009%
49.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10	774.913	P3AP2 dan KB	1,3%
PANGAN	50.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	243,909 146,006	Dinas TanKP	167,06%
PERTANAHAN	51.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	602.703,54 m2	Dinas Perkimtaru	100%
			602.703,54 m2		
52.	Persentase pengadaan tanah untuk pembangumam fasilitas umum	6.450 m2	56.900 m2	Dinas Perkimtaru	11,34%
53.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	602.703,54 m2	602.703,54 m2	Dinas Perkimtaru	100%
54.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan	Tidak ada		Dinas Perkimtaru	Suket



		Maksimum dan Tanah Absentee			
	55.	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	Suket
	56.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak ada	Dinas Perkimtaru	Suket
LINGKUNGAN HIDUP	57.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	55.05		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.05		
		Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)	31.11	Dinas Lingkungan Hidup	9.33
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	84.99	Dinas Lingkungan Hidup	25.50
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	50.55	Dinas Lingkungan Hidup	20.22
	58.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	73,840.00 92,300.00	Dinas Lingkungan Hidup	80%
	59.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	7.00 15.00	Dinas Lingkungan Hidup	46,67%
	60.	Perekaman KTP Elektronik	1.195.905 1.199.761	Disduk capil	99,68%
	61.	Persentase	80.408	Disduk	21,18%



ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	379.675	capil	
	62.	Kepemilikan Akte Kelahiran	383.220	Disduk capil	93,10%
			411.636		
63.	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	3	Disduk capil	6,38%	
		48			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64.	Persentase pengentasan desa tertinggal	31	Dispermas des	75,61%
			41		
	65.	Persentase peningkatan status desa mandiri	215	Dispermas des	102,38%
210					
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	P3AP2 dan KB	
	67.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	186.867	P3AP2 dan KB	67,73%
275.891					
PERHUBUNGAN	68.	Rasio konektivitas kabupaten	75,20%	Dinas Perhubungan	
	69.	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,41%	Dinas Perhubungan	
	70.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	8	Dinas Kominfo	17%
			48		
	71.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	104	Organisasi	34%
			308		



		dan terintegrasi			
	72.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	815.000 1,579,432	Diskominfo	52%
KOPERASI DAN UKM	73.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	116 438	DINAS Dakop dan UKM	26,48%
	74.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	352 129.475		0,27%
PENANAMAN MODAL	75.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	7,126,914,2 69,524 2,238,400,7 68,891	Dinas PTSP dan PM	318,39%
PEMUDA DAN OLAH RAGA	76.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	419 381,547	Dinas Porapar	0,11%
	77.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	25,541 381,547	Dinas Porapar	6,69%
	78.	Peningkatan prestasi olahraga	0	Dinas Porapar	Suket
STATISTIK	79.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	48	Dinas Kominfo	100%
			48		



		daerah			
	80.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	48 48	Dinas Kominfo	100%
PERSANDIAN	81.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	262 645	Dinas Kominfo	40,62%
KEBUDAYAAN	82.	Terlestariannya Cagar Budaya	33 72	Dikbud	45,83%
PERPUSTAKAAN	83.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47,91%	Dinas Arpus	47,91%
	84.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tidak ada	Dinas Arpus	Suket
KEARSIPAN	85.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 UU No 43/2009 tentang Kearsipan	50 %	Dinas Arpus	50%
	86.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan barbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesra	2,43%	Dinas Arpus	



KELAUTAN PERIKANAN	87.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	4.902,028	DKPP	
PARIWISATA	88.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-3.110	Dinas	-96%
			3.247	Porapar	
	89.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-720.737	Dinas	-60,8%
			1,187.298	Porapar	
	90.	Tingkat hunian akomodasi	12,664	Dinas	38,61%
			342	Porapar	
91.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6.812.266	Dinas		
		5.831.029.	Porapar		
	92.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	681226564	Dinas	
			5831029840	Porapar	
PERTANIAN	93.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	402,312	Dinas	642,93%
			62,575	TanKp	
	94.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-108	DKPP	-25,47%
			424		
ESDM	95.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki	Tidak ada	Dinas Perinaker	Suket



		ijin di kab/Kabupaten			
PERDAGANGAN	96.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	2.228	DINAS DAKOP DAN UKM	100%
			2.228		
	97.	Persentase kinerja realisasi pupuk	52.380,04	DINAS TanKp	58,79 %
88.900,00					
98.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	2.108	DINAS DAKOP DAN UKM	27,95%	
		7.541			
PERINDUSTRIAN	99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	45	Dinas perinaker	0,15%
			29.768		
PERINDUSTRIAN	100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	25	Dinas perinaker	100%
			25		



	101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4 10	Dinas perinaker	40%
	102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak ada	Dinas perinaker	Suket
	103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Tidak ada	Dinas perinaker	Suket
	104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10	Dinas perinaker	10
Transmigrai					



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang	No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	607.210.45	BPKAD		
			3.403			
	2	Rasio PAD	217.791.75	BPKAD		1,67%
			7.241			
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	408,838,28	BPKAD		
			6,000			
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	24,454,600,	Inspektora	t		
		000,000				
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Level 3	BPKAD			
		Level 3				
6	Opini Laporan Keuangan	904,908,14	BPKAD			
		6,572				
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	2,420,506,4			
			53,301			
	8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	WTP	Inspek		
9						
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	9	Balada	18%		
		50				
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2.768		337,9%		
		819				
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	566.842.78		46,767%		
		6.899				
		1.212.059.6				
		79.000				



FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.765	BKD	116,27%
			1.518		
	11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	324	BKD	9,87%
			3283		
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	324	BKD	100%	
		324			
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,420,506,453,302	BPKAD	89,08%
			2,717,232,254,000		
	14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	432,039,264,355	BPKAD	105,67%
			408,838,286,000		
	15	Assets management	Ada	BPKAD	Laporan BMD Screenshoot simda BMD BA rekonsiliasi aset neraca
		Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ada		
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ada		
Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ada			
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ada			
16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	261,426,558,557	BPKAD	9,64%	
		217,791,431,598,854			
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	1,082,219,102,432 1,025,698,593,941	BPKAD	105,51%



AN (TRANSPARA NSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	10		100%
			10		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang	No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	607.210.453.403		278,8%
			217.791.757.241		
	2	Rasio PAD	408,838,286,000	BPKAD	1,67%
			24,454,600,000,000		
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektora	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektora	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	904,908,146,572	BPKAD	37,38%	
		2,420,506,453,301			
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspek		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	9		18%
			50		
	8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2.768		337,9%
819					
9	Rasio nilai belanja yang	566.842.78		46,76%	



		dilakukan melalui pengadaan	6.899		
			1.212.059.679.000		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.765	BKD	116,27%
			1.518		
	11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	324	BKD	9,86%
			3283		
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	324	BKD	100%	
		324			
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	217.791.757.241	BPKAD	7,577%
			2.875.037.755.000		
	14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	438.541.666.699	BPKAD	97,293%
			450.742.220.000		
	15	Assets management	Ada	BPKAD	
		Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Laporan BMD		Laporan BMD
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Screen shoot simda BMD		Screen shoot simda BMD
Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		BA rekonsiliasi Aset	BA rekonsiliasi aset		
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		neraca	neraca		
16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.717.431.598.854	BPKAD	1,247%	
		217.791,757.241			



FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	1,082,219,102,432	BPKAD	105,51%
			1,025,698,593,941		
	18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	10		
			10		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tegal Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
4	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258
5	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75
		8	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30
		11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307
11	Menurunkan Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01
12	Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45
13	Menurunnya Resiko Bencana	15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98
14	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34

b. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu:

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
≥ 90,1	Sangat tinggi
≥ 75,01 s.d < 90	Tinggi
≥ 65,01 s.d < 75	Sedang
≥ 50,01 s.d < 65	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga



Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat									
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.									
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			4.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan									
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis			5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
	Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata								
<p>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p>									
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41
				8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73
				11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			12.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	13.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88
		7.	Menurunnya Pengangguran	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
<p>Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal</p>									
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat melalui Reformasi Birokrasi, dapat dilihat dari indikator :
 1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, mencapai : 127,13 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tegal, mencapai : 96,46 % atau dengan kategori Tinggi.
 3. Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mencapai : 100 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- b. Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, dapat dilihat dari indikator :
 1. Nilai Indeks Williamson, data tidak tersedia.
- c. Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan melalui Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator :



1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi, mencapai -26,64 % atau dengan kategori Sangat Rendah.
- d. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menurunkan kesenjangan kemiskinan, dapat dilihat dari indikator :
1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia, mencapai : 100,53 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai : 103,41 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Harapan Lama Sekolah, mencapai : 102,43 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 4. Angka Harapan Hidup, mencapai : 100,58 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), mencapai : 104,73 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai : 99,87 % atau dengan kategori Tinggi.
 7. Nilai Indeks Gini, mencapai 94,79 % dengan kategori Sangat Tinggi.
 8. Persentase penduduk miskin, mencapai : 83,88 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 9. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai 68,19 % atau dengan kategori Sedang.
- e. Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal, melalui peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator :
1. Indeks Resiko Bencana, mencapai : 99,44 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Indeks Kebudayaan, tidak tersedia data.

Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 adalah sebesar 89,63 %, atau kategori Tinggi.

c. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya



Adapun capaian dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional.

Dalam rangka mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung tujuan kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13	65,10
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					127,13	

Capaian kinerja tujuan mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 127,13 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk realisasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 63,69 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 65,10 % sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu Strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (PD);
- b. Membentuk agen perubahan di setiap unit kerja (PD) dan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan agar terwujud budaya kerja positif;
- c. Menginternalisasi dan menyosialisasikan RB ke unit kerja dan seluruh anggota unit kerja (PD) melalui media komunikasi dan pertemuan secara



regular sehingga anggota individu di unit organisasi mengetahui perkembangan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- d. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hokum yang dibentuk;
- e. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan
- f. Menyusun peta proses bisnis dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas SOP untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;
- g. Meningkatkan pengelolaan system manajemen SDM antara lain melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan menjadikannya sebagai dasar pemberian reward and punishment;
- h. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat menciptakan performance based budgeting;
- i. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi di setiap sub komponen pada area penguatan pengawasan, mulai dari penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan, sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya atas implementasi sub komponen pada area penguatan pengawasan tersebut;
- j. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja pelayanan sehingga unit tersebut menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM;
- k. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat OPD, antara lain dengan melakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan, pemberian reward/ punishment terhadap pemberian pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar, dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.



Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung sasaran kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46	73,61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,46	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 96,46 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi. Untuk realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 61,36 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61 sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Agar Pimpinan OPD lebih memberikan perhatian khusus pada penerapan SAKIP;
- b. Penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu;
- c. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program;
- d. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja;



e. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung capaian kinerja sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

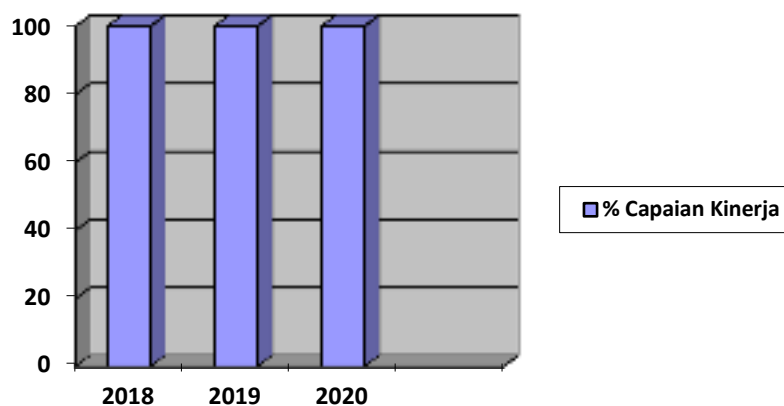
Tabel 2.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP	WTP	100	100	100	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100	100	100	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi** dan sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk mewujudkan akuntabilitas di bidang keuangan dan aset daerah. Untuk realisasi opini BPK tahun 2020 berkategori Wajar Tanpa Pengecualian sudah tercapai target akhir RPJMD. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.10
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah



Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun



2019 adalah penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan aset fasilitasi umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan oleh pengembang secara tertib. Dan untuk tertib penatausahaan persediaan, pengurus barang agar melakukan pemeriksaan persediaan secara aktual dan membuat kartu stok persediaan serta dipantau oleh pengelola barang.

Tujuan 2 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Wiliamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	NA	0,242
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					NA	

Capaian kinerja sasaran tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten.

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan di mana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km kilometer dan jalan desa sepanjang 691,28 km. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Secara kewilayahan regional Bregasmalang di Bagian Utara terlintasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlintasi oleh Jalan



Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes).

Tabel 2. 11

Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	302,68	35,72	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01
2.	Rusak Ringan	120,56	14,23	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48
3.	Rusak Sedang	177,37	20,93	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37
4.	Rusak Berat	246,66	29,11	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14
	Total	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 94,355 km atau sekitar 11,14%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangankan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruk jalan



mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase Kabupaten 490,15 km saat ini baru terbangun sekitar 57,85%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 12 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
b	Jalan yang harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	477,46	490,15
c	Jalan yang tidak harus berdrainase	169,45	169,45	169,45	169,45	160,79
d	Jalan yang berdrainase	211,17	221,98	232,79	254,41	277,95
e	% Jalan berdrainase (d/b)	44,23	46,49	48,76	53,28	57,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Tujuan 3 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahun	5,48	-1,46	-26,64	5,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-26,64	



Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar -26,64 % atau dengan kategori **Sangat Randah**. Untuk realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar -1,46 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 5,8 % sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya dengan menarik sebanyak mungkin investor menanamkan modal di Kabupaten Tegal dengan menggelar Slawi Investment Business Forum untuk menarik investor.

Tujuan 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53	70,83
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,53	

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 100,53 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 68,39 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 70,83 sehingga belum melampaui target akhir.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.



Selama ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran tingkat dan perkembangan keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Nilai IPM mampu dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan SDM-nya. Disamping itu IPM juga menjadi salah satu indikator dalam menghitung dana alokasi umum (DAU). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar kualitas manusia diatas, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita penduduknya. SDM pada seluruh dimensi pembentuknya telah menampakkan progres yang baik. Perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi jika ingin mengejar tingkat kualitas pembangunan manusia Kabupaten Tegal. Dengan upaya lebih memperhatikan peningkatan RLS melalui penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan misalnya serta pengeluaran perkapita melalui segala upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, akan sangat membantu meningkatkan indeks pembanunan manusia Kabupaten Tegal. Tentunya tanpa melepas perhatian pula terhadap aspek lain yang telah tumbuh lebih baik.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

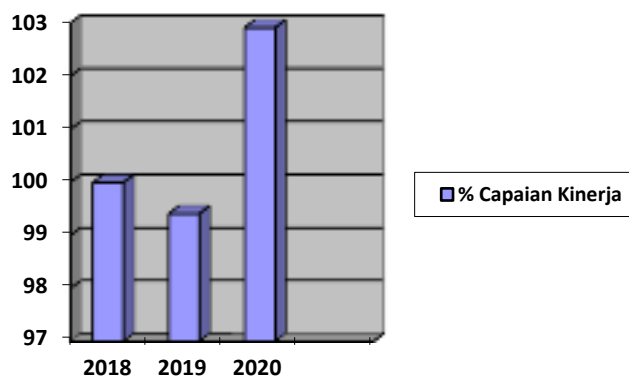
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,75	6,98	103,41	98,98	96	6,85
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37	12,67	102,43	99,84	104	12,50



Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	102,92	99,41	100	
--	---------------	--------------	------------	--

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2020 tercapai sebesar 102,92 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam hal pendidikan berkat adanya gerakan **“Ayo Sekolah Maning”** yang mulai dilaksanakan tahun 2019. Untuk realisasi Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 6,98 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 6,85 sehingga telah melampaui target akhir. Dan realisasi Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 12,67 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 12,50 sehingga telah melampaui target akhir. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.11
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan



Capaian masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi indikator angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,98 tahun dari target 6,75 tahun atau mencapai 103,41 %. Realisasi tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 98,98 %. Dengan demikian realisasi capaian tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target 2020 melebihi target yaitu sebesar 6,85 tahun.

Gambar 2.12

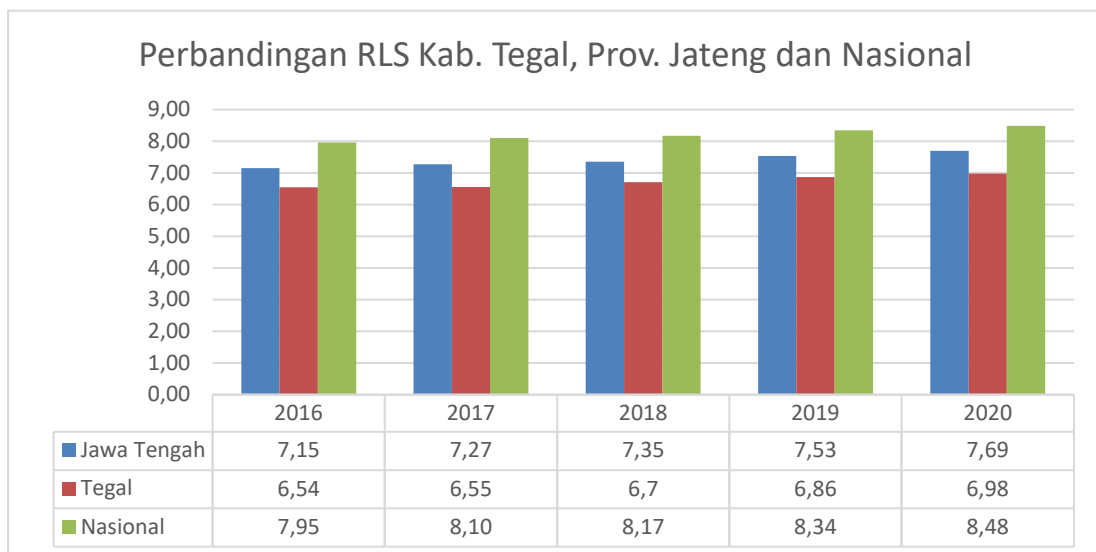
Penduduk menurut kelompok usia sekolah



Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2020

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2018 menunjukkan angka 6,70 tahun, meningkat menjadi 6,86 tahun pada tahun 2019. tahun 2020 angkanya menjadi 6,98 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2.13. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

2. Harapan Lama Sekolah

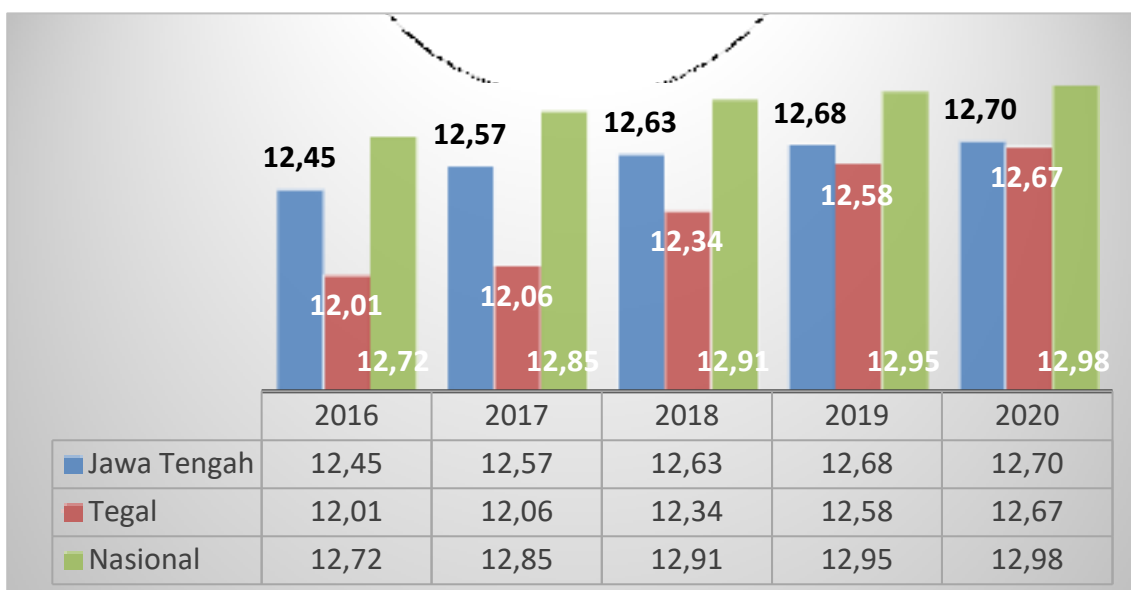
Realisasi indikator Harapan lama sekolah pada tahun 2020 yaitu



sebesar 12,67 tahun dari target 12,37 tahun atau mencapai 102,43 %. Realisasi tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 99,84%. Realisasi capaian tahun 2020 telah mencapai target RPJMD 2019-2024.

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 angkanya 12,34 tahun, tahun 2019 telah menjadi 12,58 tahun dan tahun 2020 sebesar 12,67 tahun.

Gambar 2.14. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

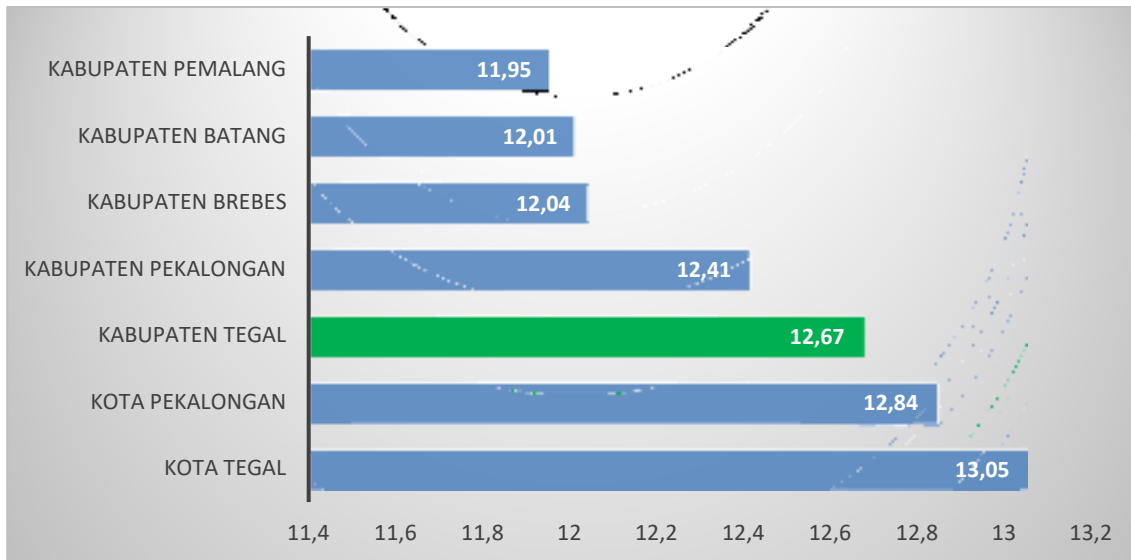
Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 12,67 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang



(11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,05 tahun).

Gambar 2. 15. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

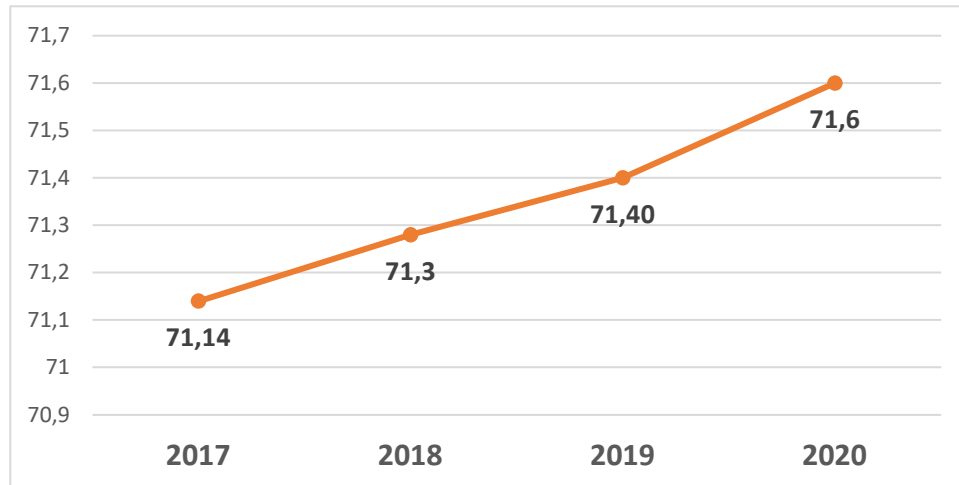
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,19	71,60	100,58	102,54	101,9	71,39
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,58	102,54	101,9	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator (Angka Harapan Hidup) pada tahun 2020 sebesar 100,58 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar 102,54 %. Untuk realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 71,60 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,39 sehingga telah melampaui target akhir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal dalam empat tahun terakhir



tergambar pada grafik berikut.

GRAFIK 2.1
ANGKA HARAPAN HIDUP KAB. TEGAL
TAHUN 2017 - 2020



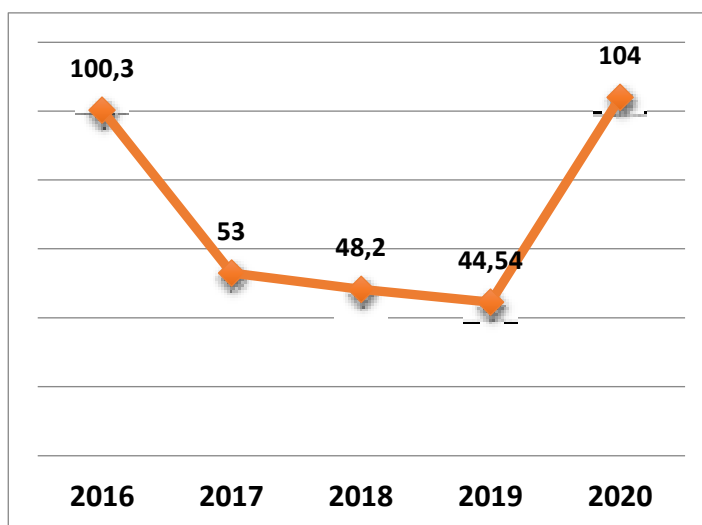
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tegal, 2021

AHH merupakan gambaran keberlangsungan hidup seseorang yang salah satunya dapat dilihat dari suatu perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun terwujudnya Angka Harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di masyarakat, tetapi tingginya derajat kesehatan masyarakat secara nyata dapat mempengaruhi angka harapan hidup. AHH dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta peningkatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti telah menurunkan angka kematian ibu (AKI) secara signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 karena upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan beberapa sektor terkait. Namun AKI meningkat pada tahun 2020, tahun dimana pandemi Covid 19 dimulai. Kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

GRAFIK 2.2
ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016 – 2020





Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian ibu pada tahun 2020 antara lain karena ibu hamil menderita hipertensi (13,46%), perdarahan (5,18%), terkonfirmasi Covid 19 (5,18%), gangguan system perdarahan (3,11%), infeksi (2,7%). Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya. Permasalahan lain yang terjadi adalah keterbatasan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19. Hal – hal yang sudah dilakukan antara lain:

1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.
2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pengadaan alat desinfektan
4. Pelaksanaan rapid test dan PCR
5. Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di PONEB dan Mampu Persalinan
6. Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir).
7. Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif.



8. Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit
9. PONEC tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif.
10. Terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat.

GAMBAR 2.16
PELAKSANAAN POSYANDU DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KAB. TEGAL TAHUN 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

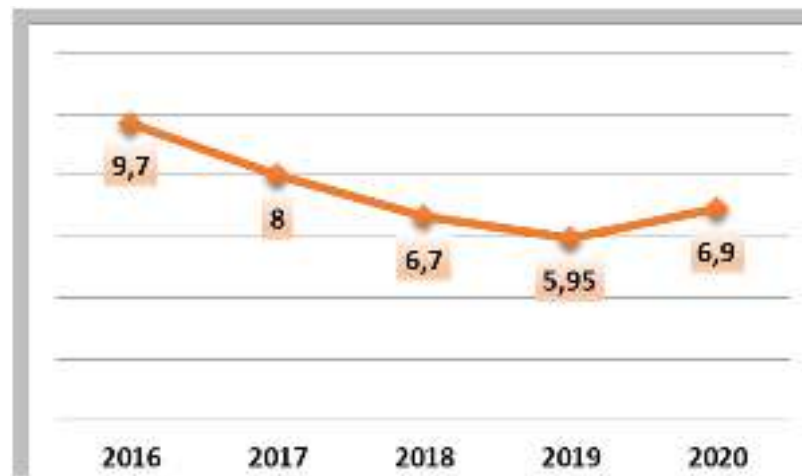
Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. AKB tahun 2020 yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari AKB tahun 2019 yaitu sebesar 5,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih melampaui target pada Renstra Dinas Kesehatan, yaitu sebesar 7,47 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Secara rinci AKB di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun adalah sebagai berikut:

GRAFIK 2.3
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TEGAL



TAHUN 2015 – 2019



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian bayi paling umum di Indonesia adalah karena asfiksia (kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran), infeksi (sepsis, pneumonia, tetanus, diare), dan berat badan lahir rendah. Dinas Kesehatan Kab. Tegal telah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada bayi secara optimal, terutama pada masa pandemic Covid 19.

Permasalahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan bayi antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan
2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan bayi baru lahir saat pelayanan kesehatan
3. Masih ada bayi baru lahir yang ditangani dukun bayi

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah – masalah tersebut antara lain:

1. Pelayanan puskesmas PONEC dan mampu persalinan tetap dibuka selama 24 jam
2. Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir
3. Pembinaan dukun bayi
4. Sosialisasi pentingnya penanganan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga masyarakat

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka

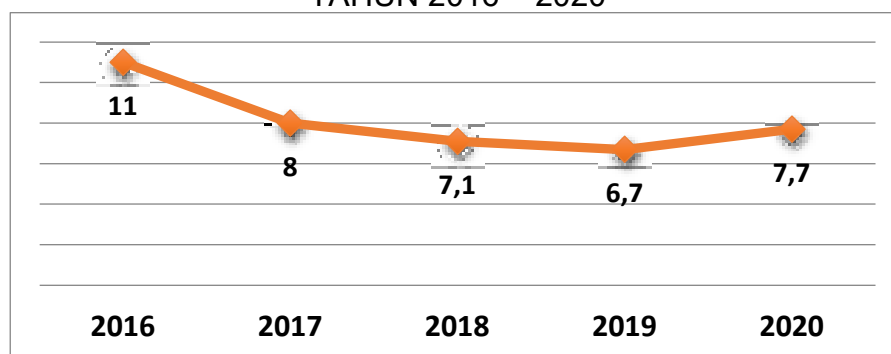


per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

AKABA di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,7 per 1000 kelahiran hidup, meningkat jika dibandingkan AKABA tahun 2019 yaitu sebesar 6,7 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah memenuhi target renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yaitu 7,97 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Kecenderungan AKABA di Kabupaten Tegal dalam waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

GRAFIK 2.4
ANGKA KEMATIAN BALITA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2020 antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.
2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tegal dalam menurunkan kematian balita, antara lain:

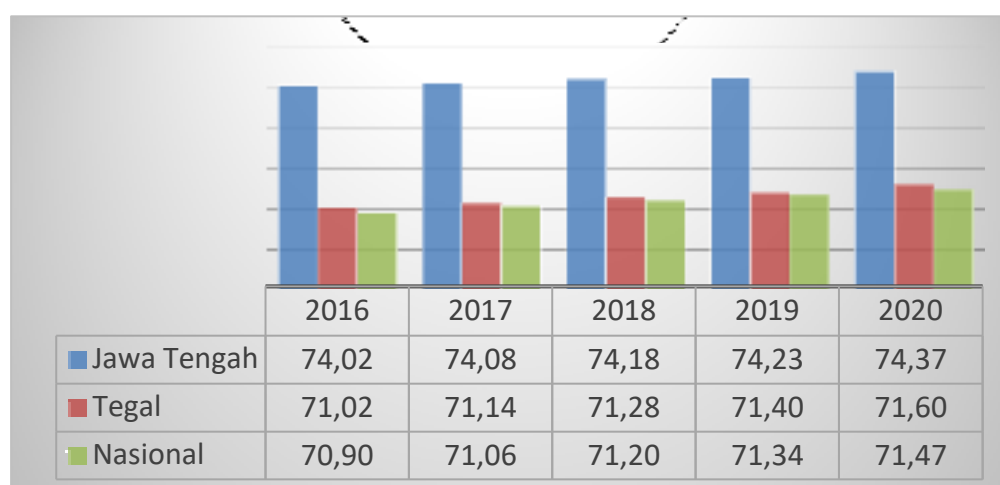
1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.



2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pemberian vit A
4. Penanganan yang tepat pada balita gizi buruk

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2020 angkanya menunjukkan 71,60 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,40 tahun pada tahun 2019 atau 71,28 tahun pada tahun 2018. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

Gambar 2.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

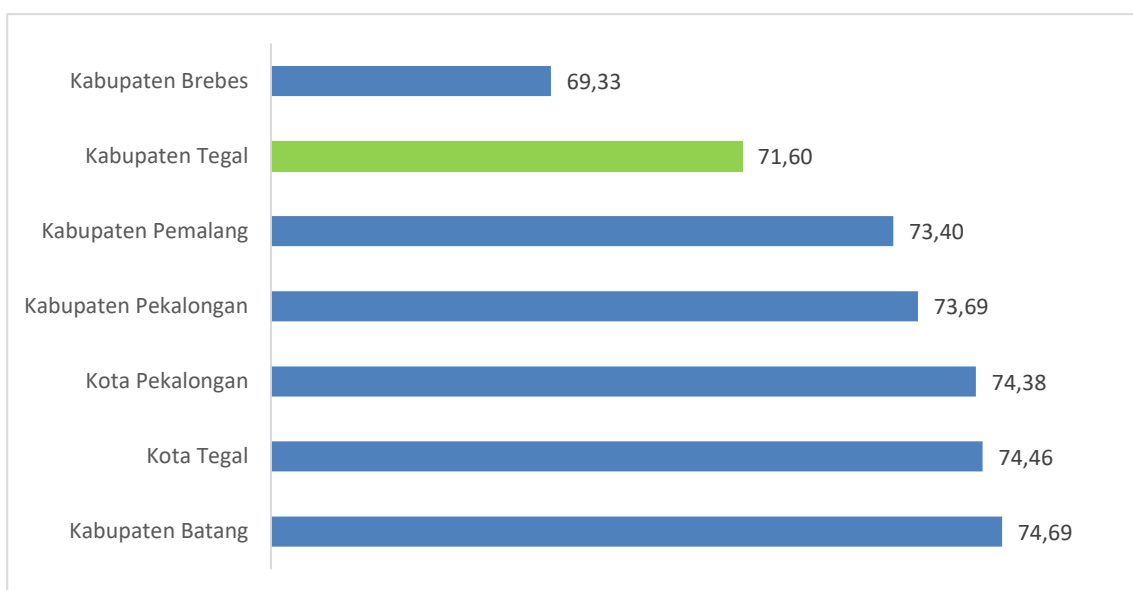


Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 71,60 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 2.18. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan





Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sasaran 5 :Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang program-program pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender yang didukung oleh 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

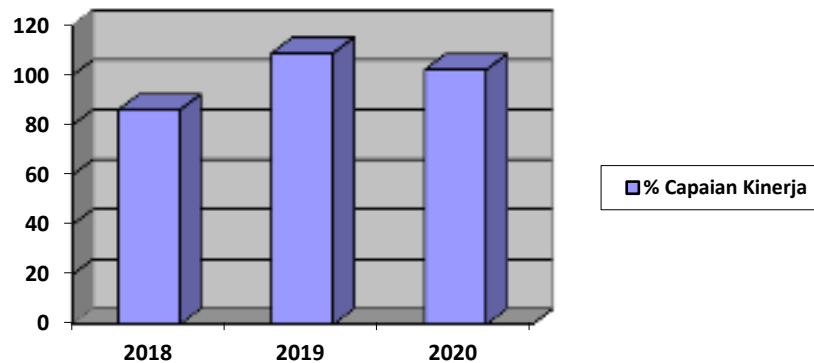
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	%	69,30	72,58	104,73	98,7	72,9	71,40
2.	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	86,85	86,74	99,87	131,98	93,8	87,21
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,30	108,97	86,13	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2020 sebesar 102,30 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 108,97%. Untuk realisasi Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 72,58 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,40 sehingga belum melampaui target akhir. Dan realisasi Indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 86,74 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 87,21 sehingga belum melampaui target



akhir. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.9
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan dan Pembangunan Gender



Capaian masing-masing indikator pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan gender adalah sebagai berikut :

1. Indeks pemberdayaan gender

Realisasi indikator indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 yaitu sebesar 72,58 dari target 69,30 atau mencapai 104,73 %. Realisasi tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 98,7 %.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Penurunan nilai IDG pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, sehingga hal tersebut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, menurunnya sumbangsih pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi pandemi covid-19 terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, antara lain program JPE (Jaring Pengaman Ekonomi)¹ dan JPE 2, program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), program bantuan langsung tunai (BLT), program penguatan ketrampilan bagi perempuan di Kabupaten Tegal.



2. Indeks pembangunan gender

Realisasi indikator indeks pembangunan gender pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,74 dari target 86,85 atau mencapai 99,87 % atau dengan kategori **Baik**. Realisasi tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 131,98 %, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu kerja keras untuk mencapai target akhir RPJMD untuk nilai indeks pembangunan gender sebesar 87,21.

IPG (indeks pembangunan gender) dan IDG (indeks pemberdayaan gender) adalah indikator yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan. IPG dirumuskan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. IPM dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Penurunan nilai IPG pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, yang mana penularan covid-19 juga mempengaruhi usia harapan hidup perempuan, menurut sebuah penelitian penularan covid-19 ini menurunkan usia harapan hidup perempuan sampai rata-rata 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian di Oxford University, pandemi covid-19 membuat usia harapan hidup perempuan dari 83,5 tahun pada 2019 menjadi 81,8 tahun pada 2020.

Tujuan 5 : Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan

Dalam rangka menurunkan kesenjangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Tujuan Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79	0,289
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					94,79	

Capaian kinerja tujuan menurunkan kesenjangan kemiskinan dengan



didukung 1 (satu) indikator (Indeks Gini) pada tahun 2020 sebesar 94,79 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 0,323 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,289 sehingga belum melampaui target akhir.

Untuk mendorong pemerataan ekonomi, pemerintah akan melakukan lima Kebijakan Dorong Penurunan Ketidakmerataan. Lima kebijakan itu meliputi menurunkan angka stunting, menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan menguatkan industri berbasis rakyat. Disamping itu penurunan rasio gini, karena mulai Bergeraknya pembangunan infrastruktur, subsidi yang lebih tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan, dan juga Dana Desa.

Sasaran 6 : Menurunkan Angka Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	% Capaian 2019	% Capaian 2018	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase penduduk miskin	%	7,01	8,14	83,88	107,98	117	5,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					83,88	107,98	117	

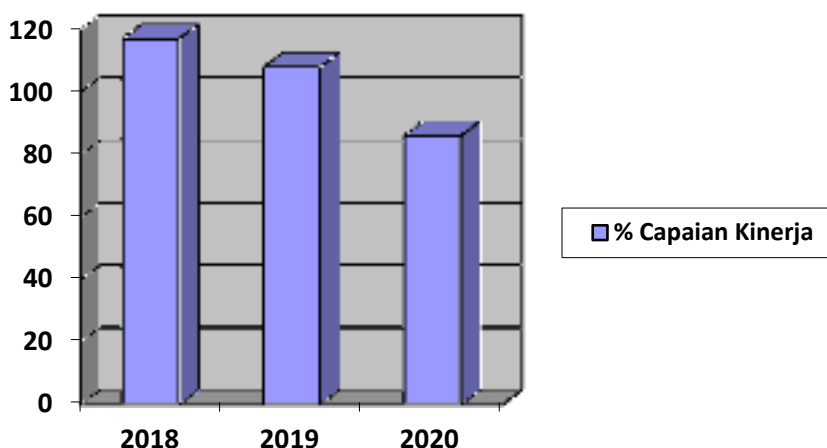
Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunkan angka kemiskinan dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 83,88 % atau dengan kategori **Tinggi**, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercapai 107,98 % dan apabila dibandingkan dengan target 2020 (awal RPJMD) yaitu sebesar 7,01 %, capaian tahun 2020 tidak dapat melampaui target. Untuk realisasi persentase penduduk miskin Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 8,14 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 5,5 sehingga belum melampaui target akhir.

Angka kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 meningkat 0,5% (4,07 ribu ruta) atau bertambah dari 7,64% (109,94 ribu ruta) di tahun 2019 menjadi 8,14% (114,01 ribu ruta) dan masuk jajaran 10 besar dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Adapun perkembangan capaian



kinerja sasaran meningkatnya derajat hidup masyarakat desa dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.19
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan



Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan pada tahun 2019 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 secara persentase selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin melakukan program bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 143.573 KPM. Jumlah penerima bantuan sembako bertambah sebanyak 67.044 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 76.529 KPM. Jumlah penerima BPNT mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. BPNT berasal dari APBN.

Daftar Penerima BPNT Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
-----	-----------	------------	--------



1.	Adiwerna	8.473	KPM
2.	Balapulang	12.105	KPM
3.	Bojong	9.610	KPM
4.	Bumijawa	11.568	KPM
5.	Dukuhturi	6.428	KPM
6.	Dukuhwaru	5.694	KPM
7.	Jatinegara	6.842	KPM
8.	Kedungbanteng	6.216	KPM
9.	Kramat	6.287	KPM
10.	Lebaksiu	9.414	KPM
11.	Margasari	9.354	KPM
12.	Pagerbarang	4.844	KPM
13.	Pangkajene	9.890	KPM
14.	Slawi	5.232	KPM
15.	Suradadi	8.667	KPM
16.	Talang	6.159	KPM
17.	Tarub	9.897	KPM
18.	Warureja	6.893	KPM
	Jumlah	143.573	KPM

2. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 57.532 KPM. Jumlah penerima bantuan PKH bertambah sebanyak 1.065 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 56.467 KPM. Jumlah penerima bantuan PKH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. Bantuan PKH berasal dari APBN.

Daftar Penerima BPNT Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	2.707	KPM
2.	Balapulang	5.903	KPM
3.	Bojong	4.695	KPM
4.	Bumijawa	5.938	KPM
5.	Dukuhturi	1.852	KPM
6.	Dukuhwaru	2.341	KPM
7.	Jatinegara	3.169	KPM
8.	Kedungbanteng	1.956	KPM
9.	Kramat	1.815	KPM
10.	Lebaksiu	3.655	KPM
11.	Margasari	3.977	KPM
12.	Pagerbarang	1.700	KPM
13.	Pangkajene	3.576	KPM



NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
14.	Slawi	2.088	KPM
15.	Suradadi	3.169	KPM
16.	Talang	2.193	KPM
17.	Tarub	3.951	KPM
18.	Warureja	2.847	KPM
	Jumlah	57.532	KPM

3. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 19.718 KPM. BLT berasal dari APBN yang diberikan bagi warga terdampak Covid 19.

Daftar Penerimaan BST Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	1.284	KPM
2.	Balapulang	1.071	KPM
3.	Bojong	354	KPM
4.	Bumijawa	577	KPM
5.	Dukuhturi	1.482	KPM
6.	Dukuhwaru	1.131	KPM
7.	Jatinegara	693	KPM
8.	Kedungbanteng	754	KPM
9.	Kramat	1.643	KPM
10.	Lebaksiu	1.215	KPM
11.	Margasari	1.453	KPM
12.	Pagerbarang	792	KPM
13.	Pangkah	1.581	KPM
14.	Slawi	1.486	KPM
15.	Suradadi	1.300	KPM
16.	Talang	974	KPM
17.	Tarub	1.210	KPM
18.	Warureja	718	KPM
	Jumlah	19.718	KPM

4. Penerima bantuan pangan bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah (APBD I) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 90.618 KPM.

Daftar Penerima Bantuan Pangan Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	6.252	KPM



2.	Balapulang	4.361	KPM
3.	Bojong	3.468	KPM
4.	Bumijawa	7.298	KPM
5.	Dukuhturi	5.146	KPM
6.	Dukuhwaru	3.927	KPM
7.	Jatinegara	3.590	KPM
8.	Kedungbanteng	1.676	KPM
9.	Kramat	9.041	KPM
10.	Lebaksiu	7.667	KPM
11.	Margasari	6.786	KPM
12.	Pagerbarang	5.373	KPM
13.	Pangkajene	3.991	KPM
14.	Slawi	2.243	KPM
15.	Suradadi	5.805	KPM
16.	Talang	6.612	KPM
17.	Tarub	2.946	KPM
18.	Warureja	4.436	KPM
	Jumlah	90.618	KPM

5. Penerima bantuan beras bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari Belanja Tidak Terduga Jaring Pengaman Sosial akibat terdampak Covid 19 dari APBD Kabupaten Tegal (APBD II) terbagi dalam 4 tahap.

Daftar Penerima Beras Tahap I

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Akibat PHK	1.066	KPM
2	Warga Mudik Tidak Berpenghasilan	575	KPM
3	Tidak bekerja	3.050	KPM
4	Calon Pencari Kerja	53	KPM
5	Pekerja informal (Pedagang Kecil, Lemprakan, Asongan, Pelaku Seni dan Pariwisata, Ustadz/Ustadzah)	41.395	KPM
6	Pelaku Jasa Transportasi, Supir angkot, Ojek, Tukang Becak dan Kusir Andong	2.354	KPM
7	Kelompok Rentan (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar dan Lansia)	16.611	KPM
8	Nelayan	3.263	KPM
9	Terdampak Kesehatan	1.300	KPM
	JUMLAH	69.667	KPM

Daftar Penerima Beras Tahap II

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
-----	---------------------------------	--------	--------



1.	Miskin DTKS dan Non DTKS	11.551	KPM
2.	Kelompok Rentan (Disabilitas dan Lanjut Usia)	705	KPM
3.	Pekerja Informal	37.734	KPM
4.	Akibat PHK dan Tidak Bekerja	2.510	KPM
	JUMLAH	52.500	KPM

Daftar Penerima Beras Tahap III

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Warga Masyarakat Miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS yang belum tercover bantuan sosial	18.838	KPM
2	Kelompok Rentan (Disabilitas dan Lanjut Usia)	896	KPM
3	Pekerja informal	34.185	KPM
4	Akibat PHK dan Tidak Bekerja	6.081	KPM
	JUMLAH	60.000	KPM

Daftar Penerima Beras Tahap IV

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kelompok Rentan Kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (PDP/ODP) Isolasi Mandiri Non ASN, TNI, Polri, BUMN BUMD	1.500	KPM
	JUMLAH	1.500	KPM

6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 840.665. Jumlah penerima PBI-JKN berkurang sebanyak 29.440 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 870.105.

Daftar Penerima PBI – JKN Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	55.144	KPM
2.	Balapulang	70.517	KPM
3.	Bojong	55.727	KPM
4.	Bumijawa	61.637	KPM
5.	Dukuhturi	42.724	KPM
6.	Dukuhwaru	37.024	KPM
7.	Jatinegara	40.896	KPM
8.	Kedungbanteng	30.952	KPM
9.	Kramat	37.266	KPM



NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
10.	Lebaksiu	54.801	KPM
11.	Margasari	59.648	KPM
12.	Pagerbarang	26.484	KPM
13.	Pangkah	55.681	KPM
14.	Slawi	26.133	KPM
15.	Suradadi	54.865	KPM
16.	Talang	39.443	KPM
17.	Tarub	50.431	KPM
18.	Warureja	41.292	KPM
	Jumlah	840.665	KPM

7. Penerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS) di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 1.257 KPM. Jumlah penerima KJS bertambah sebanyak 16 KPM dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 1.241 KPM.

Daftar Penerima Bantuan KJS Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	108	KPM
2.	Balapulang	122	KPM
3.	Bojong	20	KPM
4.	Bumijawa	20	KPM
5.	Dukuhturi	104	KPM
6.	Dukuhwaru	108	KPM
7.	Jatinegara	16	KPM
8.	Kedungbanteng	33	KPM
9.	Kramat	56	KPM
10.	Lebaksiu	219	KPM
11.	Margasari	156	KPM
12.	Pagerbarang	21	KPM
13.	Pangkah	49	KPM
14.	Slawi	34	KPM
15.	Suradadi	26	KPM
16.	Talang	16	KPM
17.	Tarub	74	KPM
18.	Warureja	28	KPM
	Jumlah	1.257	KPM



Sasaran 7 : Menurunnya Pengangguran

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunnya pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68.19	6,60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					68,19	

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunnya Pengangguran dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 68,19 % atau dengan kategori **Sedang**. Untuk realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 9,82 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 6,60 sehingga belum melampaui target akhir.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 sebesar 9,82 persen. Meningkatnya angka pengangguran mencapai 19,61 persen dibanding tahun sebelumnya, merupakan dampak kondisi Pandemi Covid-19 seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Hal ini menyebabkan beberapa lowongan kerja dibatasi sehingga berkurangnya penempatan tenaga kerja, selain itu kondisi ekonomi yang tidak stabil beberapa perusahaan juga merumahkan maupun memutus hubungan kerja beberapa pekerjanya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, pekerja yang terPHK tahun 2020 sebesar 328 orang, dan Jumlah Perusahaan yang tutup di tahun 2020 sebesar 4 perusahaan yaitu PT Bintang Mandiri Hanafindo, Kejora Jaya Raya Pt Cabang Tegal, Sung Shim International Cab. Tegal 4p, dan Jadi Kuat Bersama.

JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020

BULAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
JANUARI	449	335	784
FEBRUARI	403	313	716



MARET	394	308	702
APRIL	62	82	144
MEI	514	537	1051
JUNI	2015	1895	3910
JULI	1218	1298	2516
AGUSTUS	615	698	1313
SEPTEMBER	655	750	1405
OKTOBER	500	464	964
NOVERMBER	419	519	938
DESEMBER	368	378	746
JUMLAH	7612	7577	15189

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat, Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di Dalam dan Luar. Berikut ini data Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal tahun 2020.

**DATA KEGIATAN PELATIHAN DI UPTD BLK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

No	Kegiatan	JP	Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	Menjahit	160	2-3-2020	30-3-2020
2	Menjahit	160	1-7-2020	28-7-2020
3	Menjahit	160	1-7-2020	28-7-2020
4	Menjahit	160	4-8-2020	3-9-2020
5	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	2-3-2020	30-3-2020



No	Kegiatan	JP	Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
6	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	2-3-2020	30-3-2020
7	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	1-7-2020	28-7-2020
8	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	1-7-2020	28-7-2020
9	Prosesing Hasil Pertanian (PHP)	160	4-8-2020	3-9-2020
10	Servise HP	160	2-3-2020	30-3-2020
11	Servise HP	160	1-7-2020	28-7-2020
12	Teknisi Pendingin (AC)	160	2-3-2020	30-3-2020
13	Teknisi Pendingin (AC)	160	1-7-2020	28-7-2020
14	Tukang Finihing	160	2-3-2020	30-3-2020
15	Tukang Finishing	160	1-7-2020	28-7-2020
16	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
17	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
18	Tata Kecantikan kulit	160	2-3-2020	30-3-2020
19	Montir sepeda motor	160	6-8-2020	5-9-2020
20	Komputer	160	6-8-2020	5-9-2020

Pelatihan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%.

Tujuan 6 : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama, Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :



Tabel 2.19
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan
Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Resiko Bencana	Angka	181,98	183,00	99,44	171,84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					99,44	

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2020 sebesar 99,44% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi indeks resiko bencana Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 183 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 171,84 sehingga belum melampaui target akhir.

Wilayah Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, hal inilah yang menyebabkan **resiko bencana** di wilayah Kabupaten Tegal tergolong **tinggi** dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah.

Capaian kinerja tujuan : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana (menurunnya resiko bencana), yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama tujuan yaitu **Indeks Resiko Bencana (IRB)** pada tahun 2020 sebesar 183,00 (Level : Tinggi)) dengan tingkat capaian 99,44% atau dengan kategori **Baik**, namun capaian tersebut masih lebih rendah bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 100%, disebabkan karena tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan-kegiatan yang ada pada BPBD Kab.Tegal karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk kegiatan-kegiatan strategis seperti Pemetaan dan Kajian Resiko Bencana, Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi serta kegiatan-kegiatan penting lainnya yang nilai poinnya menentukan besarnya Indeks Resiko



Bencana (IRB).

Namun demikian masih ada beberapa kegiatan pada tahun 2020 yang bisa dilaksanakan dengan efisiensi anggaran seperti kegiatan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan sosialisasi penanganan bencana yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan gladi penanganan pandemi covid-19.

Tujuan 7 : Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kebudayaan	Tahun	62,34	NA	-	70,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-	

Realisasi indikator kinerja utama indeks kebudayaan belum tersedia data untuk level kebupaten.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha secara maksimal dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan cagar budaya, hal ini didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam kepengurusan cagar budaya.

Sebagai upaya pendataan cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan kegiatan inventarisasi benda cagar budaya di wilayah kabupaten Tegal. Adapun benda-benda cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Tegal, dapat terlihat dalam Tabel 3.7. sebagai berikut :

BENDA BENDA CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DI KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
1	Situs Makam Ki Gede Sebayu	Desa Danawarih, Balapulang	SK. Bupati



NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
2	Situs Balongan Cenggini	Desa Cenggini, Balapulang	Tegal No : 432.2 / 472 / 2008 Tanggal : 21 April 2008
3	Situs Makam Amangkurat	Desa Pesarean, Adiwerna	
4	Situs Makam Pangeran Purbaya	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	
5	Situs Makam Mbah Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
6	Fosil Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
7	Situs Candi Bulus	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
8	Situs Makam Mbah Atas Angin	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
9	Situs Lingga	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
10	Situs Makam Mbah Hanggawana	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	
11	Situs Makam Suroponolawen	Desa Pagiyanten, Adiwerna	
12	Situs Makam Mbah Dagan	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
13	Situs Makam Gendowor	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
14	Situs Makam Datuk Kafi	Desa Pagongan, Dukuhturi	
15	Situs Makam Mbah Syeh Qadir	Desa Pagongan, Dukuhturi	
16	Pintu Air	Desa Pesayangan, Talang	
17	Masjid Tukul	Desa Cangkring, Talang	
18	Situs Candi Keberkahan	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
19	Situs Makam Mbah Tanjung	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
20	Situs Makam Syeh Maulana Maghribi	Desa Danaraja, Margasari	
21	Masjid Wali	Desa Danaraja, Margasari	
22	Situs Sumur Duren	Desa Danaraja, Margasari	
23	Situs Naskah Rambang	Desa Danaraja, Margasari	
24	Situs Piring Panjang	Desa Danaraja, Margasari	
25	Situs Candi Gong	Desa Sidamulya, Pagerbarang	



NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
26	Situs Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamzami	Desa Pesarean, Adiwerna	
27	Masjid Wali	Desa Pesarean, Adiwerna	
28	Situs Makam Mbah Jinten	Desa Balamoa, Pangkah	
29	Situs Makam Pangeran Benowo	Desa Balamoa, Pangkah	
30	Situs Makam Mbah Jeneng	Desa Lembahsari, Jatinegara	
31	Situs Candi Peneker	Desa Dukuhtengah, Bojong	
32	Situs Candi Lingga	Desa Bandarsari, Bumijawa	
33	Situs Rumah Peninggalan Belanda	Desa Kemantran, Kramat	

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, maka Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 pada Bab VIII tabel 8.1, Adapun Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupateh Tegal

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat			
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi
2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten
3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK



No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan			
4	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		Indeks Williamson
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
5	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
6	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
7		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah
8			Harapan Lama Sekolah
9		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
10		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
11			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
12	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		Indeks Gini
13		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin
14		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal			
15	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana
16	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Indeks Kebudayaan



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai sama atau lebih dari 100%. Terlihat dari 14 tujuan dan sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 6 (enam) tujuan dan sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.22
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		1 Indikator	127,13	89,02	38,11
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	96,46	93,36	3,10
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator	100,00	87,97	12,03
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		1 Indikator	-	92,94	-
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator	-26,64	94,96	-



Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		1 Indikator	100,53	97,23	3,3
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator	102,92	98,54	4,38
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	102,38	95,91	6,47
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator	102,30	91,35	10,95
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		1 Indikator	94,79	86,94	7,85
	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator	83,88	89,50	-
	Menurunkan Pengangguran	1 Indikator	68,19	73,81	-
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		1 Indikator	99,44	82,20	17,24
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator	-	94,15	-
JUMLAH/ RATA-RATA			98,00	95,50	3,82

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran ari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam



RPJMD Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, 7 (tujuh) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.23
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlahn Indikator
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1 Indikator
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			1 Indikator
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			1 Indikator
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			1 Indikator
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			1 Indikator



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlahn Indikator
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator
		7.	Menurunnya Pengangguran	1 Indikator
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			1 Indikator
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			1 Indikator

Secara umum pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			4.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri			5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
	Pengolahan dan Pariwisata								
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41
				8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73
				11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			12.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79
		6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	13.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88
		7.	Menurunnya Pengangguran	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-



Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat									
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10	63,69	127,13
		1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61	61,36	96,46
		2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100,00



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.									
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			4.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258	NA	-
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan									
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	-1,46	-26,64
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	68,39	100,53
		3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	6,98	103,41
				8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	12,67	102,43
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	71,6	100,58
		5.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10.	Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	72,58	104,73
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Persen; Tahunan	86,85	86,74	99,87		
5.	Menurunkan Kesenjangan			12.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	0,323	94,79



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
	Kemiskinan	6.	Menurunkan Angka Kemiskinan	13.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	8,14	83,88
		7.	Menurunnya Pengangguran	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	9,82	68,19
<p>Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal</p>									
6.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	183	99,44
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34	NA	-

